MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017, NOMOR 22 TAHUN 2017, NOMOR 49 TAHUN 2017, DAN NOMOR 5 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 22 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 49 TAHUN	PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA, Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017; b. bahwa dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 terutama tentang Pengelolaan Keuangan Nagari di bawah lima belas juta rupiah, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;	TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA, Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2017; b. bahwa dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 terutama tentang Sanksi Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;	TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA, Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatar dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhi dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2017; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pada karya tunai yang didanai dengan Dana Desa sesua dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menter Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menter Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ledua dilakukan perubahan untul ketiga kalinya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkar Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 5495);

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 5495);

Indonesia Nomor 5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017:
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4).

- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran

- Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2010 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

		2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4).	6 Tahun 2014 tentang Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2); 12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 51); 13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 2).
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA
BABI	BABI	Tetap	Tetap
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM	· · ·	r
Pasal 1	Pasal 1		
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:		
Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.	Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.		
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.	3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.		
Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari.	Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang meliputi beberapa Nagari.		
 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filoasofi Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat 	 Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filoasofi Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat 		
Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 7. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan	Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 7. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan		

- Pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
- Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpinan oleh Kepala Jorong.
- Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa.
- Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Keuangan yang akan dipergunakan dalam kegiatan periode tertentu.
- 13. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniek Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 14. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
- 15. Pembinaan Agama Nagari adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa di Nagari.
- 16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang bertugas untuk merencanakan pembangunan di Nagari.
- Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
- Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan

- Pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
- Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpinan oleh Kepala Jorong.
- Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa.
- 12. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Keuangan yang akan dipergunakan dalam kegiatan periode tertentu.
- 13. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniek Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 14. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
- Pembinaan Agama Nagari adalah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa di Nagari.
- 16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang bertugas untuk merencanakan pembangunan di Nagari.
- 17. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
- Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
- Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan

- untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD.
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Nagari adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Nagari.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- Dana Nagari adalah dana yang pengelolaannya diatur dalam APB Nagari.
- Belanja Operasional adalah belanja yang digunakan untuk Operasional Pemerintahan Nagari.
- 26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu asset periode Akuntasi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.
- Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah hasil penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari.
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari unsur Perangkat Nagari ,unsur Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat.
- Tim Pemantau Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tim yang memantau kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari unsur Kelembagaan dan Masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah.
- Tim Teknis Nagari adalah perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik Kegiatan (Pemerintah Nagari) untuk melakukan perencanaan dan pengawasan pekeriaan.
- Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki

- untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD.
- Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Nagari adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Nagari.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- Dana Nagari adalah dana yang pengelolaannya diatur dalam APB Nagari.
- Belanja Operasional adalah belanja yang digunakan untuk Operasional Pemerintahan Nagari.
- 26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu asset periode Akuntasi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.
- Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah hasil penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari.
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali Nagari untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Wali Nagari terdiri dari unsur Perangkat Nagari ,unsur Kelembagaan Masyarakat dan Masyarakat.
- 31. Tim Pemantau Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tim yang memantau kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari unsur Kelembagaan dan Masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah.
- Tim Teknis Nagari adalah perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik Kegiatan (Pemerintah Nagari) untuk melakukan perencanaan dan pengawasan pekeriaan.
- Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki

- pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam RKP Nagari.
- Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- Kepala Seksi/Kaur adalah unsur dari Pelaksana Teknis kegiatan dengan Bidangnya.
- Bendahara Nagari adalah unsur Staf Sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Nagari.
- Rekening Kas Nagari adalah tempat rekening menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
- Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Nagari yang masuk ke dalam APB Nagari melalui Rekening Kas Nagari.
- Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening Kas Nagari.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah suatu mekanisme untuk menyusun dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahunan Nagari.
- Penata usahaan adalah seluruh rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kegiatan Pemerintahan Nagari.
- Pertanggungjawaban adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan Nagari yang memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akutansi Pemerintahan.
- Buku bantu Bank adalah buku bantu yang menguraikan segala jenis Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Nagari.
- 44. Buku Kas Umum selanjutnya disingkat BKU adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan pada Pemerintahan Nagari.
- 45. Buku Kas Pembantu selanjutnya disingkat BKP adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan atau pengeluaran per jenis kegiatan atau penerimaan keuangan per jenis penerimaan pada Pemerintahan Nagari.
- 46. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang adil diluar bidang keuangan Negara.

- pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam RKP Nagari.
- Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku Koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
- 35. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur dari Pelaksana Teknis kegiatan dengan Bidangnya.
- Bendahara Nagari adalah unsur Staf Sekretariat Nagari yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan Keuangan Nagari.
- Rekening Kas Nagari adalah tempat rekening menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
- Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Nagari yang masuk ke dalam APB Nagari melalui Rekening Kas Nagari.
- Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening Kas Nagari.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah suatu mekanisme untuk menyusun dan menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahunan Nagari.
- 41. Penata usahaan adalah seluruh rangkaian aktifitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap kegiatan Pemerintahan Nagari.
- Pertanggungjawaban adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintahan Nagari yang memenuhi prinsipprinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akutansi Pemerintahan.
- Buku bantu Bank adalah buku bantu yang menguraikan segala jenis Transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Nagari.
- 44. Buku Kas Umum selanjutnya disingkat BKU adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan dan pengeluaran keuangan pada Pemerintahan Nagari.
- 45. Buku Kas Pembantu selanjutnya disingkat BKP adalah buku kas yang menguraikan dan menggambarkan segala jenis penerimaan atau pengeluaran per jenis kegiatan atau penerimaan keuangan per jenis penerimaan pada Pemerintahan Nagari.
- 46. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang adil diluar bidang keuangan Negara.

- Sarana dan Prasarana publik adalah bantuan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana publik di Nagari.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Nagari adalah Surat Perjanjian antara TPK Nagari atau Jorong dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nagari.
- Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- 51. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
- 52. Pos Kesehatan Nagari selanjutnya disingkat Poskesri adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di Nagari dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
- 53. Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 atau lebih rumah tangga yang bertetangga.
- 54. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
- 55. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat PPKBN adalah institusi masyarakat di tingkat Nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berecana di Nagari.
- 56. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Sub PPKBN adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat Jorong yang menggerakan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di tingkat Jorong.
- 57. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja di tingkat Nagari.
- 58. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai Lansia di Tingkat Nagari.
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPMN adalah Masyarakat yang

- Sarana dan Prasarana publik adalah bantuan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana publik di Nagari.
- 48. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Nagari adalah Surat Perjanjian antara TPK Nagari atau Jorong dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nagari.
- 49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- 51. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
- 52. Pos Kesehatan Nagari selanjutnya disingkat Poskesri adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di Nagari dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
- Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 atau lebih rumah tangga yang bertetangga.
- 54. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
- 55. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat PPKBN adalah institusi masyarakat di tingkat Nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berecana di Nagari.
- 56. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Sub PPKBN adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat Jorong yang menggerakan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di tingkat Jorong.
- Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja di tingkat Nagari.
- Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai Lansia di Tingkat Nagari.
- Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPMN adalah Masyarakat yang

- dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan.
- 60. Kader Teknis adalah Masyarakat yang dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- Imam Nagari adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah di Nagari.
- Gharim Nagari adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat mesjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi jamaah.
- Bilal Nagari adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan apabila masuk waktu shalat dan juga membantu tugas imam.
- 64. Khatib Nagari adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jumat.
- 65. Guru TPQ/TPSQ adalah guru yang mengajar dilembaga taman pendidikan Al-quran serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qurani, sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-quran dalam kehidupan sehari-hari.
- Guru Pondok Pesantren adalah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Swasta.
- Pengawasan adalah proses dalam menetapkan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- 68. Musyawarah pertanggung jawaban adalah Musyawarah yang dilakukan TPK untuk mempertanggungjawaban Keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- 69. Papan Informasi adalah tempat menginformasikan seluruh Kegiatan dan Penggunaan Dana.
- Monitoring adalah proses rutin pengumpulan dan pengukuran kemajuan atas objektif/ memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
- Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.

- dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan.
- 60. Kader Teknis adalah Masyarakat yang dipilih untuk memfasilitasi Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 61. Imam Nagari adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah di Nagari.
- 62. Gharim Nagari adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat mesjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi jamaah.
- 63. Bilal Nagari adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan apabila masuk waktu shalat dan juga membantu tugas imam.
- 64. Khatib Nagari adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jumat.
- 65. Guru TPQ/TPSQ adalah guru yang mengajar dilembaga taman pendidikan Al-quran serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qurani, sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-quran dalam kehidupan sehari-hari.
- Guru Pondok Pesantren adalah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Swasta.
- Pengawasan adalah proses dalam menetapkan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja vang telah ditetapkan tersebut.
- 68. Musyawarah pertanggung jawaban adalah Musyawarah yang dilakukan TPK untuk mempertanggungjawaban Keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Papan Informasi adalah tempat menginformasikan seluruh Kegiatan dan Penggunaan Dana.
- 70. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan dan pengukuran kemajuan atas objektif/ memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
- Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
- Termin adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah
- Guru Radiatul Anfal/TK adalah guru pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Pemuda Nagari adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis sehingga merupakan sumber daya manusia pembangunan saat ini dan yang akan datang.

BAB II		Tetap	Tetap	Tetap
MAKS	UD DAN TUJUAN		·	·
Pasal				
(1)	Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman			
(-)	teknis pengelolaan keuangan Nagari sehingga Nagari			
	dapat melaksanakan pengelolaan keuangan nagari sesuai			
	dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah			
	Nagari.			
(2)	Tujuan Pedoman umum Pengelolaan Keuangan Nagari			
	adalah agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan			
	pengelolaan keuangan Nagari dengan baik, efektif,			
	efisien, transparan, akuntabel dan tertib sesuai dengan			
	aturan yang berlaku.			
BAB II		Tetap	Tetap	Tetap
	PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	retap	ictap	Tetap
Pasal				
(1)	Keuangan Nagari dikelola berdasarkan azas-azas sebagai			
	berikut:			
	a. transparan, yaitu: keterbukaan atas semua tindakan			
	dan kebijakan yang diambil;			
	b. akuntabel, yaitu: semua tindakan dan kebijakan			
	yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai			
	dengan peraturan yang berlaku; dan			
	c. partisipatif, yaitu: semua tindakan dan kebijakan			
	yang diambil mengakomodir kebutuhan masyarakat			
	dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan			
	nagari;			
(2)	Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud			
	pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun			
	anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan			
	tanggal 31 Desember.			
BAB I	1	Tetap	Tetap	Tetap
KEKUA	SAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	·	·	·
Pasal				
(1)	Wali Nagari sebagai Pimpinan Pemerintahan Nagari			
(1)				
	merupakan Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan			
	Keuangan Nagari dan mewakili Pemerintahan Nagari			
	dalam kepemilikan kekayaan Nagari yang dipisahkan,			
	serta bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran;			
(2)	Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana			
	dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai			
	kewenangan:			
	a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB			
	Nagari;			
	b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang			
	Nagari;			
	c. menetapkan Bendahara Nagari;			
	d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan			
	penerimaan Nagari;			
	e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan			
	barang milik Nagari;			
	f. menetapkan PTPKN;			

E. menetaphan Prick Gen h. menetaphan Rusaa Penggana Anggaran (3) Wali Nagari selatu Pephati Penggana Anggaran (4) Wali Nagari selatu Pephati Penggana Anggaran (5) Wali Nagari selatu Pephati Penggana Anggaran (5) Selata Penggana Sangaran Penggana Penggana Penggana Sangaran (5) Selata Penggana sangaran Penggana Penggana Penggana Penggana Sangaran Penggana Selata Penggana Sangaran Penggana Selata Penggana Selata Penggana Selata Penggana Selata Penggana Selata Penggana Penggana Selata Penggana Penggana Selata Penggana Peng					
h. meretophan Kasan Penggana Anggaran; Shalipathan dinascu pada syst (1), mengyahatan sebagainan dinascu pada syst (1), mengyahatan pengeluaran atsa beban kerja anggaran bebanja Nagari, b. melakuhan tedakan yang mengabbatan pengeluaran atsa beban kerja anggaran bebanja Nagari, d. melakuhan tenglana Pengana bebanja Nagari, d. melakuhan pengeluaran atsa Saplana dan dan di melakuhan pengeluaran atsa Saplana dan dan di melakuhan pengeluaran katan/pengaluaran berangan pengerinana bukan di melakuhan berangkan katan/pengaluaran berangan yang terbah dinaspaluaran katan/pengaluaran berangan yang terbah dinaspaluaran dan berangan katan pengeluaran berangan yang terbah dinaspaluaran katan/pengaluaran berangan yang terbah dinaspaluaran dan berangan pengerinan yang terbah dinaspaluaran dan berangan pengerinangan dan sepagain kecemangannya kepada Serketakan kyangari dan pengerinangan kepadapan dan dan pengerinan dan pengerin		g menetankan TPK: dan			
Signatur Salaku Pajakat Pengguna Anggaran sebaginaran dimaksul pada saya (1), mengunyai tuga. sebaginaran dari beban kerja anggaran belanja pengulahakan pengulahakan pengulahakan pengulahan p					
sebagairana dimasuol pada yak (1), menpunjat lupas sebagai berikut: a. melatukan indakan yang mengahbahan pengelanan asis bebah kepa anggaran belanja berikut: b. melakuanan anggaran Naggari yang dipinipinnya, c. c. melakukan pengelanan pengelanan dan melakukan pengelanan dan sebagain dan melakukan pengelanan dan sebagain dan melakukan pengelanan dan sebagain dan se	(2)				
sebajas berikut: a. melaksikam sindakun yang mengakitantan pengelasan atas belain kerja anggaran belainja pengelasan atas belain kerja anggaran belainja berikutan pengelasan atas belain kerja anggaran yang dibinjanya. c. melaksikah penguljan atas taghan dan melakukan pengelain atas taghan dan pengelain kerja sama denan pinak iain dalain batas anggaran yang telah dicrapkan; f. mengelobi barang militi dapat yang menjadi direpakan; e. mengelobi barang militi dapat yang menjadi tanggungkewab Nagari yang dipinginnya; h. menyampalana laporan keuangan Nagari yang dipinginnya; h. menyampalana laporan keuangan Nagari yang h. mengelain atanggungkewab Nagari yang dipinginnya; lapat dapat penguna Anggaran dalain melaksimakan tugas-tugas danggaran dalain melaksimakan tugas-tugas danggaran dalain melaksimakan tugas-tugas danggaran penguna penguna penguna penguna penguna anggaran penguna	(5)				
a. melaksikan tindaban yang mengahisatan pengelakanan pengelakanan apengelakanan atas belah neba anggaran belah Nagari. c. melaksikan anggaran Rapari yang dipimpinnya. c. melaksikan pengela sata taphan dan melaksikan pengelain sata taphan dan melaksikan pengelain atas taphan dan melaksikan pengelain katan/perjaijan tengelain buban penginian takan/perjaijan kerja sana dengan mengadahan ikatan/perjaijan kerja sana dengan mengelain buban buban anggaran yang telah didapakan. di mengelakan ikatan/perjaijan kerja sana dengan didapah dan didapakan dan buban anggaran yang telah putang yang mengelai tanggangiawah dasan/bekayan deserih yang menjadi tanggangiawah Nagari yang dipimpinnya, g. mengelobi tanggan dan kesanjah Nagari yang dipimpinnya, dan berapan Nagari yang dipimpinnya, dan berapan Nagari yang dipimpinnya, dan berapan dipimpinnya, dan lemangan Nagari yang dipimpinnya, dan lemangan Nagari yang dipimpinnya, dan lemangan Nagari yang dipimpinnya, dan lemangan kepada sekerah sepadahan pelaksinahan tugas pengelain sebadah sekerahan pelaksinahan pelaksinahan pelaksinahan pelaksinahan sebadah sekerangannya kepada sekerahan pelaksinahan tegasyan, dan kepada sekerahan pelaksinahan tegasyan, dan kepada sekerahan pelaksinahan tegasyan, dan kepada sekerahan pelaksinahan tegasyan, kepada sekerahan pelaksinah kebangan kepadahan kebangan kagari kerindahan pengelaksinah dan pengelakan kebangan kagari kerindahan pengelakan kebangan kagari kerindahan pengelaksinah dengan kepadahan kebangan kagari kerindahan pengelaksi kerindahan pengelaksi kerindahan dan					
pengeharan atas betan kerja angaran belanja Nagari; b. melaksanakan angaran Nagari yang dipinpinnya: c. melaksanakan pengujuan penerimaan bakan agaik, e. mengadakan istan/perjanjan kerja sama dengan piluk balin dalam batas angaran yang tobh disebahanakan pengujuan penerimaan bakan agaik, e. mengadakan istan/perjanjan kerja sama dengan piluk balin dalam batas angaran yang tobh disebahar, i. mengadakan istan/perjanjan kerja sama dengan piluk balin dalam batas angaran yang tobh disebahar, i. mengadakan istan/perjanjan kerja sama dengan piluk balin dalam batas angaran yang menjad disepanjawah Nagari vang dipinpinnya, g. menjadi angaran galinik daerah/keskayan daerah yang menjadi danganjawah Nagari yang dipinpinnya, dipinpinnya, dia dipinpinnya, dia dipinpinnya, dipinpinpinnya, dipinpinnya, dipinpinpinpinnya, dipinpinnya, dipinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpinpin		•			
Nagari; b. melakankan anggaran Nagari yang dipimpinnyo; c. melakakan pengujan atas taghan dan melakukan pengujan penerimaan bukan d. melakanakan pengujan penguj		, ,			
b. melaksanakan anggaran Nagari yang dipimpinnya; c. melaksukan pengipian ata taghan dan melaksukan pengipian ata taghan dan dan delaksanakan perunguan penerimaan bukan pengipian data taghan dan dasan/perjenjaa kerja sama dengan pinka diadan/perjenjaa kerja sama dengan pinka diadan/perjenjaa kerja sama dengan dieterapkan. dieterapkan: diet					
c. melakukan pengujian atsa tegahan dan melakukan pengujian atsa tegahan dan melakukan pengujian atsa tegahan dan melakukan dan d. melaksanakan penungiran penerinaan bukan pujak. apilak dan ikatan/penjujah kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetaplan; f. mengebola utang dan piutang yang menjadi tanggunjawah Nagari yang dipinpinnya; g. mengelola barang milik daeral/pekayaan daerah yang menjadi tanggunjawah Nagari yang dipinpinnya; h. menjadi tanggunjawah Nagari yang yang yang hayan yang dipinpinnya; dan i. menjawasi anggaran hagari yang dipinpinnya; dan i. mengawasi anggaran hagari yang dipinpinnya; dan tendipinpin dan sahagan kewangan yang tenduk penguan Anggaran dimaksud pada ayat (1) dapat menimpilahan sahagan kewangan yang danjuk sebagai Kusas Penggura Anggaran; Kusas Penggura Anggaran; Kusas Penggura Anggaran; beranggunjak kewangan kepilahan yang ditahuk kewangan kepilahan yang ditahuk kewangan kepilahan yang dishahan daha Penguna Anggaran permetinah Nagari distakan dan pengelolahan kewangan kepilahan yang dishahan daha Penguna Anggaran permetinah Nagari distakan dan pengelolahan kewangan kepilahan yang dishahan dahan pengelolahan kewangan kepilahan pengelolahan dan kewangan kepilahan yang dishahan dahan Penguna Anggaran permetinah Nagari distakan dan pengelolahan kewangan kepilahan yang dishahan daha Penguna Anggaran pengelolahan dan pengelolahan kewangan kepilahan yang dishahan daha Penguna Anggara pengelolahan dan pengelolahan dan pen					
pengujian atas rajahan dan di melakanahan pemerjian penerimaan bukan pajaki; e. mengdakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah f. mengdakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah f. mengdaka tang dan pikatag yang menjadi tanggungkawah Nagari yang dipimpinenya; g. mengdela barang milik (aserah/kekayana deserah yang menjadi tanggungkawah Nagari yang dipimpinay, h. menyampaliana laporan keuangan nagari yang dipimpinay, h. menyampaliana dalam melakanahan tugas- tugas sebagainana dimakad ada ayat (1) dapat melimpahana sebagaina kewenangannya kepada Sekertari Nagari atur pelabat lain yang ditunjuk sebagai Kusas Penggura Anggaran; [5] Dalam melakanahan tugarny, Kusas Pengguna Anggaran sebagainana dimukad pada ayat (2) dibantu oleh Pendakara, dibantu oleh Pendakanahan tugarny, kerapada pengelolaan dan kansa Pengguna Anggaran permerintah Nagari ditespah enggan keputuan Wali Nagari; [6] Sendahara dan Kusas Pengguna Anggaran permerintah Nagari ditespah enggan keputuan Wali Nagari; [7] Sekertaris Nagari beterindak sebaku koordinator pelakana pengelolaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunan dan melakanakan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunan dan keuangan Nagari kepada Tetap		b. melaksanakan anggaran Nagari yang dipimpinnya;			
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pojak: e. mengadakan ikaran/perjanjan kerja sama dengan pihak kin dulam batas anggaran yang telah ditetaphan; f. mengeluan kang dan piuang yang menjadi bangungulan kang dan piuang yang dipinipininya dan menjadi tanggunglawah Nagari yang dipinipininya dan langunglawah Piuang dipinipininya dan langunglawah Piuang dipinipininya dan langunglawah kangari dipinipininya dan langunglawah sebagai na benahan tugas-tugas sebagai na kesanan tugas-tugas sebagai na kesanan bangari yang dipinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya sebagai na pinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya dipinipininya dipinipininya dan yang dipinipininya dipinipininya dan yang dipinipininya dipini		c. melakukan pengujian atas tagihan dan melakukan			
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pojak: e. mengadakan ikaran/perjanjan kerja sama dengan pihak kin dulam batas anggaran yang telah ditetaphan; f. mengeluan kang dan piuang yang menjadi bangungulan kang dan piuang yang dipinipininya dan menjadi tanggunglawah Nagari yang dipinipininya dan langunglawah Piuang dipinipininya dan langunglawah Piuang dipinipininya dan langunglawah kangari dipinipininya dan langunglawah sebagai na benahan tugas-tugas sebagai na kesanan tugas-tugas sebagai na kesanan bangari yang dipinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya sebagai na pinipininya dan pinipininya dan yang dipinipininya dipinipininya dipinipininya dan yang dipinipininya dipinipininya dan yang dipinipininya dipini		pengujian atas tagihan dan			
pojok: e. emengedakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak kiin dalam batas angaran yang telah diterapian; f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggunjawah Nagari yang dipimpinnya; g. mengelola barang milik diserah/kidayaan daerah yang menjadi tanggunjawah Nagari yang dipimpinnya; g. mengelola barang milik diserah/kidayaan daerah yang menjadi tanggunjawah Nagari yang dipimpinnya; dan h. menyampakan laporan keusangan Nagari yang dipimpinnya; dan l. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; dan l. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; dan l. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; dan lapasa dibarang dipimpinnya; dan lapasa dipimpinnya; dan lapasa dipimpinnya; dan lapasa dipimpinnya; dan lapasa dipimpinnya; dan menjambahan sebagai na dibar melikanahan tugas- tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat memianghahan sebagai ne kewangannya kepada Sekretaris Nagari datu pejabat bin yang ditunjuk sebagai kusas Pengguna Anggaran sebagaiman adimaksud pada ayat (2) menyapahan laporan fisik dan keusangan kegatan yang dipimpinnya; dan pengelolaan keungan Nagari, ketagan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) menyapahan laporan fisik dan keusangan kegatan yang dipimpinnya; dan pengelolaan keungan Nagari, bertangungawab atas pengelolaan keungan Nagari, bertangungawab atas pengelolaan keungan Nagari, bertangunganyab atas pengelolaan keungan Nagari, bertangungan sepada yan kapara pengelolaan keungan Nagari, kerta penggungan dan pengelolaan keungan Nagari, seta penggungan dan pengelolaan keungan Nagari, kerta penggungan dan pengelolaan keungan Nagari, kerta penggungan dan dari dari: a. Sekertaris kapari sebagai kondrinaksu, da da ayat (1), dietapkan dengan Keputusan Wali Nagari dibantu dibir PFKN: b. Kepala Seksi/Kauru din dari: a. Sekertaris kapari sebagai kondrinaksu, da da ayat (1), dietapkan dengan Keputusan Wali Nagari dibantu dibir PFKN: b. Kepala Seksi/Kauru din dari: a. Sekertaris kapari pengala pengala perikut:		d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan			
e. mengadakan katan/perjanjan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawah Nagari yang dipimpinnya; g. mengelola barang milik derah/kekayaan dareh yang menjadi tanggungjawah Nagari yang dipimpinnya; h. menyampaikan laporan kewangan Nagari yang dipimpinnya; h. menyampaikan laporan kewangan Nagari yang dipimpinnya; can melaksanakan nagaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagianan denaksud pada ayat (1) disata melimpahkan sebagian kewanangannya kepada Sekretaria Nagar atu pelabut bian yang ditunjuk sebagia Kuasa Pengguna Mangaran kepada sekretaria Nagara atu pelabut bian yang ditunjuk sebagia Kuasa Pengguna dimaksud pada ayat (2) menyapahan laporan fisik dan keuangan kepidakan dimaksud pada ayat (2) menyapahan laporan fisik dan keuangan kepidah yang dibantu oleh bendahara; (8) Badahar dan kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditelapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (9) Sekretaria Nagari Dengan kepidakan pengelokan keuangan kagari, setta penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, setta penggunan hangari, bertanggungkawab atas penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, setta penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, seta penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, keta penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengalokan pengelokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengalokan keuangan Nagari, wati penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, seta penggunan dan pengelokan keuangan Nagari, wati pengalokan dan pengalokan pengelokan keuangan Nagari wati dan pengalokan dan pengalokan keuangan Nagari pengalokan dan pengalokan pengelokan keuangan Nagari pengan pengaran pengaran pengaran dan pe		, , ,			
pihak lain dalam batas angsaran yang telah ditesuplan; f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tangsungiawah Nagari yang dipimpinnya; g. mengelola barang milik daerah/kakyaan daerah yang menjadi tanggungiawah Nagari yang dipimpinnya; h. menyampalanan laiporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; l. menganwai angsaran Nagari yang dipimpinnya; l. pelabit Pregugua Anggaran didam melaksanahan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipat melimpiahan sebagian kewarangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat bini yang ditunjuk sebagai Kusas Pengguan Anggaran kewarangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat bini yang ditunjuk sebagai Kusas Pengguan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyapian laparan fisik dan keuangan kegiatan yang ditunjuk debendahara; l. Dalam melaksanakan tugasiya, Kusas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyapian laparan fisik dan keuangan kegiatan yang dituntuk debendahara; l. Sekretaris Nagari etakan debendahara; l. Sekretaris Nagari detapada hoputusan wali Nagari; l. Sekretaris Nagari bertanggungiawah atas pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungiawah atas pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungiawah atas pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungiawah atas pengegunan dan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunan dan pengelolaan keuangan Nagari kepada Wali Nagari diretapada diraksud pada ayat (1), berasal dari urusar Perngelat Nagar terdir dari. b. Kepala Sekul/Auri San c. Bendahara. c. Bendahara. c. Bendahara. d. Perngelat Nagari perdir dari. b. Kepala Sekul/Auri San c. Bendahara. c. Bendahara. d. Perngelat Nagari perpekangai perpekangai pengbungan pengelolaan keuangan Nagari kepada wali (1), berasal dari urusar Perngelat Nagar depada wali (1), berasal dari urusar Perngelat Nagar depada wali (1), dietapakan dengan Nagari wali Nagari depada wali (1), dietapakan dengan Nagari pengaban pengelolaan keuangan Nagari					
ditetaplani; f. mengelola barang dan piutang yang menjadi tanggungjawah Nagari yang dipimpinnya; g. mengelola barang milik daerali/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawah Nagari yang dipimpinnya; h. menyampalkan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; l. mengawasi anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagainama dimakudi pada ayat (1) dapat sekatanan dimakudi pada ayat (1) dapat sekatanan sebagainama dimakudi pada ayat (1) dapat sekatanan kangaran sebagainama dimakudi pada ayat (2) menyampalan laporan fikik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (S. Dalam melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran sebagainana dimakudi pada ayat (2) menyapaha laporan fikik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (S. Bendahara dan Kusas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari deteaphan dengan Keputusan Wali Nagari; yi Sekretari Nagari bendapianan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, sertang pengelolaan keuangan Nagari, sertang penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, sertang penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, sertang penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, woli penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, woli penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, woli penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari kepada woli hayari; (D. Moure-orsy PTPKN sebagainana dimakudi pada ayat (1), bersal dari unusu Penangai Nagari kegari certar dari sa Sekretaris Nagari sertangan pengelolaan keuangan Nagari, woli penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari kepada woli penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari kepada dan dari dari sa Sekretaris Nagari sertangangai pengelolaan keungan Nagari kepada dan dari dari dari sa Sekretaris Nagari sertangangai pengelolaan keungan Nagari Alpari dari dari sa Sekretaris Nagari sertangangai kepada dari dari dari sa Sekretaris Nagari sertangan					
f. mengelola utang dan piutang yang menjadi tangungawah Nagari yang dipimpinnya, g. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tangungsiwah Nagari yang dipimpinnya; h. menyampaikan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; h. menyampaikan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; dipimpinnya; dan i. mengawai anggaran Nagari yang dipimpinnyo; (4) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas Sebagiaman dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian keweningamya kepada Sekretars Nagari atan pelabuta lani yang ditunjuk sebagii kusaa Pengguna Anggaran; Kusaa Pengguna Anggaran; Salam neksaanskan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran dimaksud pada ayat (2) menyapian laporan fisk dan keuangan keptatha nyang dibantu debi bendahara; dibantu debi bendahara; dibantu debi bendahara; disantu dengan Keputusan Wali Nagari, serta penggunan dan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunan dan sengelolaan keuangan Nagari, serta penggunan dan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunan dan peng					
tanggungiawab Nagari yang dipimpinnya; g. mengelolb barang milik dearah/kebayaan daerah yang menjadi tanggungiawab Nagari yang dipimpinnya; h. menyampailan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; dan i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; l. peranguna Anggaran dalam melakasanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahhan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kusus Pengguna Anggaran; (5) Dalam melakanakan tugasnya, Kusaa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyapakan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu dole bendahara; (6) Bendahara dan Kusas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelakanan pengelolana keuangan Nagari, bertanggungiawah atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, kerpada wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelakana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungiawah atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, kepada Wali Nagari; (8) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersaul dari unsur Perangkat Magari redirati: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur Japari sekada hebayah perkut dalah sebagai berikut: Tetap		·			
g, mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Nagari yang dipimpinnya; h, menyampalkan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; dipimpinnya; dan L, mengawasi naggaran dalam melaksanakan tugas- tugas sebagainana dinaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagaina kewenangannya kepada Sekretaris Nagani atau pelabat tali yang dirujuhuj sebagai Kusas Pengguna Anggaran; Kusas Pengguna Anggaran, Kusas Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran, melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran sebagainana dimaksud pada ayat (2) menyabata laporan fisik dan kebangan kegistan yang dibantu oleh bendahara; Bendahara dan Kusas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetaykan dengan Keputusan Mali Nagari; V Sekretaris Nagan bertukas sehaki kondrahara pelaksanan pengebalah kesangan Repusan Mali Nagari; V Sekretaris Nagan bertukas sehaki kondrahara pelaksana pengebalah kesangan kebayasan Nagari kepada Wali Nagari; L Jalam melaksanakan pengelolaan kekangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PEPKsi, L Jusur-unsur PPKsi, Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada pada pada pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada pada pada pada ayat (1), berasal dari unsur Peranggarakan kapat pada pada pada pada pada pada pada					
yang menjadi tanggungiawab Nagari yang dipimpinnya; h. menyampalan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; lai i mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; lai i mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; lai i mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; lai yang ditunjuk sebagai Kusas Pengguna Anggaran; lai kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kusas Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegistan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kusas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolana keuangan Nagari, kerta penggunaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekangan Nagari, kerta penggunaan dan pengelolaan keungan Nagari, kerta penggunaan dan p					
digimpinnya; h. menyampalkan Japoran keuangan Nagari yang digimpinnya; dan i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; (4) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas- tugas sebagiaman dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Seketaris Nagari atu pelabat lain yang ditunjuk sebagai Kusia Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kusia Pengguna Anggaran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) menyipakan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendaharo; (6) Bendahara dan Kusia Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolan keuangan Nagari, serta penggunaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasid adri unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Kondimator; b. Kepala Seksi/Karu, dan c. Bendahara. (7) PTRNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (8) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (9) Types Sebagai harab bagai berikut:					
h. menyampalkan laporan keuangan Nagari yang dipimpinnya; ani i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; ani i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; ani i. mengawasi anggaran Alabam elaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian Kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Penggana Anggaran; (S) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyapkan laporan fisik dan keunangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (B) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (S) Sekrataris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keunangan Nagari, bertanggungiawab atas pengeluaran dan penerimanan keunangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; (S) Magari dibantu oleh PTPKN; (S) Magari dibantu oleh PTPKN; (S) Wasari Angari kepada Wali Nagari; (S) Wasari Angari kepada wali Nagari; (S) Wasari Nagari kepada wali Nagari (S) Wa					
dipimpinnya; dan i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; i. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekertaris Nagari ata pelabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyipahan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dilamtu oleh bendahara; Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksna pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan keuangan Magari kepada Wali Nagari; Pasal S Tetap T		· · · · ·			
i. mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; (A) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas- tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpalkan sebagajan kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; (B) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiaphan laporan fisik dan keusangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (B) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (S) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimana keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, wali Nagari dibantu oleh PTFKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari setadir dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kuri, dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari		h. menyampaikan laporan keuangan Nagari yang			
(4) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugastugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kusas Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kusas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegistan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kusas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputsan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimana keuangan Nagari, serta penggeluaran dan penerimana keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; (8) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; (9) Sekretaris Nagari akan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan keyayan Nagari kepada Wali Nagari; (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kewangan Nagari, wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendaharaa. (3) PTRNs bebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari		dipimpinnya; dan			
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagia kewanangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, sertangengjawah atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, sertangengjawah dan pengelolaan keuangan Nagari, sertangengjawah dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unusr-unsur PTRN Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN dalah sebagai berikut:		 mengawasi anggaran Nagari yang dipimpinnya; 			
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, serta pengelolaan keuangan Nagari, sertangengiawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 Tetap Tetap Tetap Tetap	(4)	Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas-			
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, serta pengelolaan keuangan Nagari, sertangengiawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 Tetap Tetap Tetap Tetap		tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat			
Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; (8) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (9) Unurunsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung Jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
Kuasa Pengguna Anggaran; (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 Tetap					
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibahutu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasas Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan Keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal S (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, wali Nagari dibantu oleh PTPKN; Nagari dibantu oleh PTPKN; berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(5)				
menyiapkan laporan fisik dan keuangan kegiatan yang dibantu oleh bendahara; (6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal S Tetap Tetap Tetap Pasal S Tetap Tetap Tetap	(5)				
dibantu oleh bendahara; Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; 7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal S 10 Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, wali Nagari dibantu oleh PTPKN; 20 Unsur-unsur PTRN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. 3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari 1, ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari					
(6) Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pemerintah Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTRN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari; (7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(6)	,			
(7) Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Nagari, bertanggungjawab atas pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTFKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(6)				
pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta pengeluaran dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 Tetap					
pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(7)				
penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
Wali Nagari; Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:		pengeluaran dan penerimaan keuangan Nagari, serta			
Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:		penggunaan dan pengelolaan kekayaan Nagari kepada			
 (1) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut: 		Wali Nagari;			
Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	Pasal	5	Tetap	Tetap	Tetap
Nagari dibantu oleh PTPKN; (2) Unsur-unsur PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(1)	Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari, Wali			
berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:		Nagari dibantu oleh PTPKN;			
berasal dari unsur Perangkat Nagari terdiri dari: a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(2)	•			
a. Sekretaris Nagari sebagai Koordinator; b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	` '				
b. Kepala Seksi/Kaur; dan c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
c. Bendahara. (3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:					
(3) PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
dengan Keputusan Wali Nagari (4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(2)				
(4) Tugas dan Tanggung jawab PTPKN adalah sebagai berikut:	(3)				
	(4)				
a manyurun dan malaksanakan Kahijakan Dangalalaan I	(4)				
a. Henyusun uan melaksanakan kenjakan rengeloladi		a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan			

	APB Nagari;			
b.	menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB			
	Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggung			
	jawaban pelaksanaan APB Nagari;			
c.	melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan			
0.	kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;			
d.	menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban			
u.	pelaksanaan APB Nagari;			
e.	melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti			
C.	penerimaan dan pengeluaran APB Nagari;			
f.	bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan			
1.	dana Nagari di Nagari;			
	bertanggungjawab terhadap pengelolaan			
g.	administrasi dan pelaporan seluruh transaksi			
	kegiatan Dana Nagari;			
h	• .			
h.	bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Dana Nagari baik yang bersifat keuangan maupun			
	, , ,			
	non keuangan; melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip			
1.				
	dana Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan			
	pelestarian dana Nagari bersama dengan pelaku			
	lainnya;			
J.	melakukan administrasi dan pelaporan setiap			
1.	transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan;			
k.	membuat pertanggungjawaban keuangan dan			
1 .	realisasi rencana kerja pada Wali Nagari;			
1.	melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung			
	Rencana Penggunaan Dana dan Laporan			
	Penggunaan Dana yang dibuat oleh TPK dalam			
	setiap tahapan proses Dana Nagari dan sesuai			
	dengan ketentuan;			
m.	melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan			
	secara langsung administrasi dan pelaporan TPK;			
n.	mendorong transparansi dalam pengelolaan			
	keuangan, perkembangan kegiatan dan informasi			
	lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan			
	secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;			
	dan			
0.	melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain)			
	penyelesaian permasalahan-permasalahan yang			
	menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan			
	pemanfaatan Dana Nagari		_	_
BAB V		Tetap	Tetap	Tetap
RUANG LIN	IGKUP			
Pasal 6				
	kup Peraturan Bupati ini meliputi :			
_	elolaan Dana Desa; dan			
	elolaan ADN;			
BAB VI		Tetap	Tetap	Tetap
	AAN DANA DESA			
Bagian Kes	atu			
Umum				

			T	
Pasal				
(1)	Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam			
	pasal 6 huruf a, diperuntukan membiayai program			
	Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan kegiatan			
	pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai			
	dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada Nagari			
(2)	Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat			
(2)				
	(1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah			
	Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses			
	masyarakat Nagari			
_	n Kedua	Tetap	Tetap	Tetap
-	n Dana Desa			
Pasal	8			
Dana	Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)			
mem	ounyai tujuan:			
а.	meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan			
	kualitas hidup manusia serta penanggulangan			
	kemiskinan;			
b.	pengembangan kemandirian dan kesejahteraan			
D.	masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap,			
	keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;			
C.	meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam			
	rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi			
	masyarakat;			
d.	mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong			
	royong masyarakat;			
e.	meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari			
	melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag);			
f.	meningkatkan kekayaan dan aset Nagari; dan			
g.	pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari.			
	n Ketiga	Tetap	Tetap	Tetap
_	gunaan Dana Desa	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal				
	gunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Nagari dan RKP			
Nagar				
Pasal	10	Tetap	Tetap	Tetap
Dana	Desa digunakan untuk membiayai :			
a.	pembangunan; dan			
b.	pemberdayaan masyarakat			
Pasal	11	Tetap	Tetap	Pasal 11
(1)	Dana Desa untuk membiayai Pembangunan sebagaimana	·	· ·	(1) Dana Desa untuk membiayai Pembangunan
1 ` ′	dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, digunakan untuk			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
	kegiatan pembangunan dengan konstruksi sederhana			digunakan untuk kegiatan pembangunan
	yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Nagari dan			dengan konstruksi sederhana yang dialokasikan
				, ,
(2)	ditetapkan dalam Musyawarah Nagari;			sesuai dengan kebutuhan Nagari dan
(2)	Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			ditetapkan dalam Musyawarah Nagari;
	dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Nagari			(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
1	meliputi:			(1) dialokasikan untuk kegiatan pembangunan
1	a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan			Nagari meliputi:
	pemeliharaan sarana prasarana Nagari.			a. Pengadaan, pembangunan,
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan			pengembangan dan pemeliharaan sarana
	pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan			prasarana dasar untuk pemenuhan
	,	I	I .	process and perfections

pemukiman, antara lain:

- pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- selokan;
- tempat pembuangan sampah;
- 4) gerobak sampah;
- 5) kendaraan pengangkut sampah;
- 6) mesin pengolah sampah; dan
- sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) tambatan perahu;
 - jalan pemukiman;
 - 3) jalan poros Nagari;
 - jalan Nagari antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - jalan Nagari antara permukiman ke lokasi wisata;
 - jembatan Nagari;
 - gorong-gorong;
 - 8) terminal Nagari; dan
 - sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari
- Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Nagari;
 - b) website Nagari;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam

kebutuhan:

- a. Lingkungan pemukiman;
- b. Transportasi;
- c. Energi; dan
- Informasi dan komunikasi.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesehatan masyarakat; dan
 - Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Nagari, meliputi:
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - Kesiapsiagaan menghadapi bencana
 alam:
 - 2) Penanganan bencana alam; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan ditetapkan dalam Musyawarah Nagari.

	c) irigasi Nagari;		
	d) percetakan lahan pertanian;		
	e) kolam ikan;		
	f) kandang ternak;		
	g) mesin pakan ternak;		
	h) gudang penyimpanan sarana produksi		
	pertanian (saprotan); dan		
	i) sarana prasarana produksi pertanian		
	lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
2)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan		
	pemeliharaan sarana dan prasarana		
	pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan		
	pangan dan usaha pertanian yang difokuskan		
	pada kebijakan satu Nagari satu produk		
	unggulan, antara lain:		
	a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai		
	jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan		
	tempat penjemuran ikan dan lain-lain yang		
	sejenis;		
	b) lumbung Nagari;		
	c) gudang pendingin (cold storage); dan		
	d) sarana dan prasarana pengolahan hasil		
	pertanian lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
3)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan		
	pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan		
	industri kecil yang difokuskan pada kebijakan		
	satu Nagari satu produk unggulan, antara lain:		
	a) mesin jahit;		
	b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;		
	c) mesin bubut untuk mebeuler; dan		
	d) sarana dan prasarana jasa dan industri		
	kecil lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
4)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan		
	pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran		
	yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari		
	satu produk unggulan, antara lain:		
	a) pasar Nagari;		
	· · · ·		
	· ·		
	c) tempat pelelangan ikan;		
	d) toko online;		
	e) gudang barang; dan		
	f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya		
	yang sesuai dengan analisis kebutuhan		
	dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam		
	musyawarah Nagari		
-			

	5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan		
	pemeliharaan sarana dan prasarana Desa		
	Wisata, antara lain:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	b) panggung hiburan;		
	c) kios cenderamata;		
	d) kios warung makan;		
	e) wahana permainan anak;		
	f) wahana permainan outbound;		
	g) taman rekreasi;		
	h) tempat penjualan tiket;		
	i) rumah penginapan;		
	j) angkutan wisata; dan		
	k) sarana dan prasarana Nagari Wisata		
	lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
	6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan		
	pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi		
	Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi		
	yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari		
	satu produk unggulan, antara lain:		
	a) penggilingan padi;		
	b) peraut kelapa;		
	c) penepung biji-bijian;		
	d) pencacah pakan ternak;		
	e) pemotong/pengiris buah dan sayuran;		
	f) pompa air;		
	g) traktor mini; dan		
	h) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai		
	dengan analisis kebutuhan dan kondisi		
	Nagari yang diputuskan dalam		
	musyawarah Nagari		
d.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan		
	pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian		
	lingkungan hidup antara lain:		
	pembuatan terasering;		
	2) kolam untuk mata air;		
	3) plengsengan / pengecoran miring pinggir		
	sungai; dan		
	4) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan		
	hidup lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan		
	dalam musyawarah Nagari		
e.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan		
	pemeliharaan sarana prasarana untuk		
	penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian		
	luar biasa lainnya yang meliputi:		
	pembangunan jalan evakuasi dalam bencana		
	gunung berapi;		
	2) pembangunan gedung pengungsian;		
	3) pembersihan lingkungan perumahan yang		

terkena bencana alam;			
4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan			
perumahan yang terkena bencana alam; dan			
5) sarana prasarana untuk penanggulangan			
bencana yang lainnya sesuai dengan analisis			
kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan			
9 , 9 ,			
dalam musyawarah Nagari	+ :	- .	D 142
Pasal 12	Tetap	Tetap	Pasal 12
(1) Dana Desa untuk membiayai Pemberdayaan Masyarakat			(1) Dana Desa untuk membiayai Pemberdayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dialokasikan			Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
paling tinggi 40% dari total pagu Dana Desa dan ditetapkan			Pasal 10 huruf b, dialokasikan sesuai dengan
dalam RKP Nagari;			kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam RKP
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			Nagari;
dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat			(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:			dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan			masyarakat meliputi:
Sosial Dasar			a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan			proses perencanaan, pelaksanaan dan
masyarakat, antara lain:			pengawasan pembangunan Nagari;
a) penyediaan air bersih;			b. Pengembangan kapasitas di Nagari meliputi :
b) pelayanan kesehatan lingkungan;			pendidikan, pembelajaran, pelatihan,
c) penyediaan makanan sehat untuk			penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan
, , ,			, ,
peningkatan gizi bagi balita dan anak			materi tentang pembangunan dan
sekolah;			pemberdayaan masyarakat Nagari;
d) pengelolaan balai pengobatan Nagari;			c. Pengembangan ketahanan masyarakat
e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan			Nagari;
menyusui;			d. Pengelolaan dan pengembangan sistem
f) pengobatan untuk lansia;			informasi Nagari;
g) fasilitasi keluarga berencana;			e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan
h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi			sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
penyandang disabilitas; dan			pemberdayaan perempuan dan anak, serta
i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan			pemberdayaan masyarakat marginal dan
masyarakat Nagari lainnya yang sesuai			anggota masyarakat Nagari penyandang
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa			disabilitas;
yang diputuskan dalam musyawarah Nagari			f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan			lingkungan hidup;
kebudayaan antara lain:			g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi
a) bantuan insentif guru PAUD;			bencana alam dan penanganannnya;
b) bantuan insentif guru taman belajar			h. Dukungan permodalan dan pengelolaan
keagamaan;			usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh
- ·			
c) penyelenggaraan pelatihan kerja;			Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
d) penyelengaraan kursus seni budaya;			dan/atau BUMNag Bersama;
e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;			i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan			kelompok masyarakat, koperasi dan/atau
g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan			lembaga ekonomi masyarakat Nagari
kebudayaan lainnya yang sesuai dengan			lainnya;
analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang			j. Pengembangan kerjasama antar Nagari dan
diputuskan dalam musyawarah Nagari			kerjasama Nagari dengan pihak ketiga; dan
b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan			k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal			Nagari lainnya yang sesuai dengan analisa
yang tersedia			kebutuhan Nagari dan ditetapkan dalam
1) pengelolaan lingkungan perumahan Nagari,			Musyawarah Nagari.
1) pengerolaan inigkungan peruniahan Magan,			wiusyawatan wagan.

a) pregoloban carrant carrant pregoloban carrant carr	antara lain:		
b) pengelelaam sanama pengelalaam air iminata- dan c) pengelelaam singkungan penutahana laterupa kendali Nagari yang diputuhan dalam munyawarah Nagari pengelelaan terminal sagari; b) pengelelaan terminal sagari; b) pengelelaan terminal sagari; b) pengelelaan terminal sagari; c) pengelelaan terminal sagari; b) pengelelaan terminal sagari; d) pengelelaan pengelelaan terminal pengelelaan terminal pengelelaan terminal pengelelaan terminal term	 a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 		
clar O) pengelolaan lingkungan pemukinan lainnya yarg sesiad dengan aralaisi sebutuhan dan kundid hugari yarg diputuskan didam lainnya pengelolaan termali siannya yarg sesiad diputuskan didam makara penahu dan O) pengelolaan termali siannya yarg sesiad diputuskan didam makyaran didam makyaran hagari didam didam makyaran didam didam makyaran didam didam makyaran didam didam makyaran didam pengelolaan makyaran denomi pengelolaan makyaran denomi didam didam didam didam didam didam makyaran didam pengelolaan makyaran denomi didam dida			
c) pengeloblası mighangan pemukuman inlamya yang sersusi dengan andisis kebatuhan dan kondisi. Nagari yang diputukan daha kondisi Nagari, yang diputukan daha kondisi nagari tangsortasi balanya yang sesual dengan andisis kebatuhan dan kondisi dengan balan munyabaran dan pengeloban tembatan dari dan munyabaran dan pengeloban tembatan dari dalam munyabaran dan dan munyabaran dan dan munyabaran dan dan munyabaran dan dan dan dan dan dan dan dan dan d			
yang sesual dengan antidis kebutuhan dan kondis Nagari yang diputuhan dalam sunyawarah Nagari genjutuhan dalam sunyawarah Nagari genjutuhan dalam sunyawarah Nagari genjutuhan dalam sunyawarah Nagari genjudahan termahan parahu; dan pengelebaha termahan parahu; dan pengelebaha termahan salam muyawarah Nagari yang deputuhan dan muyawarah Nagari yang deputuhan dalam muyawarah Nagari yang deputuhan pengelebahan imbaha persahan venegi biogas:) pengenbahan immahan persahan venegi deputuhan dalam nagari yang dalam pengelebahan pe			
kondisi Magari yang diputukan dalam musyawarah hagari antara lain: 2) pengelolaan terangorasi antara lain: 3) pengelolaan terangorasi lainnya yang sesual dengari analisis keluhahan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam myayawarah kagari angisis keluhahan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam myayawarah kagari angisis keluhahan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam myayawarah kagari beraprukan, antara lain: 3) pengembangan enlamban diputuhan untuk energi beraprukan berapada pengelolaan berapada pengelolaan pendelam utaha denoma pendelam pengelolam sarana denoman arana denoman arana denoman pendelam utaha kerbanan pengelolam pendelam			
musyawarah Nagari 2) pengelolana transporta Nagari, antara lain: a) pengelolana transporta pendur, den b) pengelolana transporta pendur, den cengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalan musyawarah Nagari 3) pengenbangan energi terbarukan, antara lain: a) pengelolana transporta dirah biranyu; b) pengelolana mindan dirah biranyu (b) pengelolana penbangki listrik tenaga angin, dan a) Pengerbangan energi terbarukan lainnya yang sesasi dengan analisis kebuntuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam lainnya (b) pengelolan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi dan komunikasi, antara lain: b) koran Nagari; d) rada komunikasi, dan c) analisia kebutuhan dan komunikasi kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam mayang sesasi dengan analisia kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam mayang sesasi dengan analisia kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam mayang sasai dengan analisia kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam mayangari Nagari (b) pengelolana prolinki usaha petakanan untuk di pengelolana prolinki usaha petakanan untuk di pengelolana prolinki usaha petakanan untuk pengelolana prolinki usaha petakanan untuk pengelolanan pangari; b) pendelolanan pangari pengelolanan pangari; b) pendelolanan pangari pendeksi petartaina (b) pengelolanan pangari (b) pengelolanan pangari (b) pengelolanan pangari pondisi petartaina (b) pangadan pangari pengelolanan pangari (b) pengelolanan pangari pendeksi petartaina (b) pangadan pangari pengelolanan pangari (b) pengelolan			
2) pengelolaan tramaparian kiagari, antara lain: a) pengelolaan tambatan perahuy dan () pengelolaan tambatan perahuy dan () pengelolaan tambatan talanya yang sesual dengan sanilais kebutuhan dan kondali kiagari yang diputuhan diabir muayawaha) 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengelahan limbah perahasan untuk energi biogas:)) perbututan bibethanol dari ubi kaya; () pengelahan limbah perahasan untuk energi biogas:)) perbututan bibethanol dari ubi kaya; () pengelolaan mempali terbarukan antara lain: a) pengelolaan mempali terbarukan antara lain: () pengelolaan pembangkii tisrik teraga angin; () pengelolaan pembangkii tisrik teraga angin; () pengelolaan pembangkii tisrik teraga angin; () pengelolaan mengel terbarukan lainnya yang sesai dengan analisis kebutuhan dan kondali Nagari yang diputuskan dalam muyawarah Nagari a) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: () selom informasi Angari; () selom informasi dan komunikasi lainnya yang sesui dengan analisis kebutuhan dan kondali Nagari yang diputuskan dalam muyawarah Nagari () pengelolaan usaha eleonomi produled sera () pengelolaan usaha eleonomi produled sera () pengelolaan nodaki utaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokushan pada kelipiahan satu Nagari satu produk ungadan antara lain: () pengelolaan ponduksi utananan keras; () pengelolaan ponduksi utananan keras; () pengelolaan ponduksi utananan keras; () pengelolaan ponduksi pertanian () jaman satan pangan, () pengelolaan ponduksi pertanian			
a) pergeloban terminal repeatur, dan c) pergeloban transportasi laiminay ayang sesual c) pergeloban transportasi laiminay ayang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondola kanalisi (a) pengeloban transportasi (a) pengeloban pendelopat (a) pengeloban solarasi (a) pengeloban pengeloban solarasi (a) pengeloban pengelo			
b) pengelolana transporal perahu, dan () pengelolana transporal salamya yang assala dengan analisa kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyawarah Nagari () pengelahani limbah peternakan untuk energi biogas, () pembutaan bioestahan dari ubi kayu; () pengelolanan minyak goreng bekas menjadi biodisese); () pengelolanan pembangkai tistrik tenaga nagin; diputuskan dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyawarah Nagari) pengelolanan ridormasi dan komunikasi, antara lain: () sistem informasi dan komunikasi, antara lain: () sistem informasi dan komunikasi, antara lain: () sistem informasi kangari; () pengelolanan informasi dan komunikasi, antara lain: () pengelolana informasi dan komunikasi laimmya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyawaran Nagari () pengelolanan informasi dan komunikasi laimmya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyawaran Nagari () pengelolanan sianana an pengan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu penduk unggulan, antara lain: () pengelolanan hanaman keras; () pengelolanan hanaman pangan; () pengelolanan hanaman keras; () pengelolanan pangan, penduksi pertanian () pengelolanan pangan penduksi pertanian			
dengan analisis kebuthan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 3) pengerbang diputuskan dalam musyawarah Nagari 3) pengerbangdihan limbah peternakan untuk energi b) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodisesel; d) pengolahan minyak goreng diputuskan dan kontosi Nagari, d) radio komunitas; dan e) pengolahan minyak goreng bekas pengolahan padaksi untun yang sesuai dengan analisti kebutuhan dan kontosi Nagari yang diputuskan dalam munyawarah fikagari d) pengolahan pada musha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kelpiahan satu Nagari satu produk unggalan, antara lain: a) pembibitan tanaman keras; d) pengolakan padak ternak; d) pengolakan dalahan padakan ternak dan disakan pertanian yang			
dengma malnisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputusan dalam musyawarah Nagari 3) pengerbangan energi terharukan, antara lain: a) pengolohan dinobah peternakan untuk energi biogas; biogas; biogas; dipengulohan minyek goreng bekas menjadi dipengulohan pembangkit listrik tenaga angin; din e) Pengembangan energi terhanukan lisinnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari; d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; d) website Nagari; d) website Nagari; d) website Nagari; d) website Nagari; d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan maniskis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari; d) website Nagari; d) pengelolaan informasi Magari (b) koran Nagari; d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan maniskis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan saran dan pasarana ekonomi l) pengelolaan padakai tautah pertanian untuk ketaharan pangan dan usaha pertanian untuk ketaharan pangan dan tasaha pertanian untuk ketaharan pangan dan tasaha pertanian yang dibukakan pada kelpiaha satu Nagari satu produk unggulan, artara lain: d) pengelolaan padakan tarawan keras; d) pengelolaan padakan tarawan keras; d) pengelolaan padakan tarawan pangan; d) pengelolaan padakan tarawan pangan;			
Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengelahan limbah peternakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengelahan minyak goreng bokas menjadi biodisest; d) pengelahan pembangkil istrik tenaga angin; dan e) Pengenbangan energi terbarukan iainnya yang depan analisis kebutuhan dan yang depan analisis kebutuhan dan yang depan analisis kebutuhan dan musyawarah Nagari d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunikasi, dan komunikasi alainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan komunikasi alainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan komunikasi alainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari pengelolaan informasi dan komunikasi alainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari pengelolaan insorma dan komunikasi alainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari pengelolaan surana dan usha peternian yang diputuskan dalam musyawarah Nagari pengelolaan surana dan untuk ketaharan pangan dan usha bertanian untuk ketaharan pangan dan usha peternian yang diflokokan pada ketiplahan satur Nagari situ pengelolaan padasi sutah pertanian yang diflokokan pada ketiplahan satur Nagari situ pengelolaan padasi sutah pertanian yang diflokokan pada ketiplahan satur Nagari situ pengelolaan pangan, bembilibat nananan pangan, bembilibat nananan pangan, bempelaban lain air tawar; e) pengelaban pakan ternak dan alai satawar; e) pengelaban pakan ternak dan alai satawar; e) pengelaban pakan ternak dan alai satawar, e) pengelaban pakan ternak dan alai satawar.			
Nagari 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengelahan limbah peternakan untuk energi biogos; b) pembutata bibethanol dari ubi kayu; c) pengelahan miyak goreng belas menjadi bodidesel; d) pengelahan pembangkit listrik tenaga angin; e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesual dengan analisis kebutuban dan kondisi Nagari yang diputusikan dalam musyawarah Nagari dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; c) webate Nagari; c) webate Nagari; e) pengelokan jamasi dan komunikasi elebutuan dan kondisi Nagari yang diputusian dalam musyawarah Nagari e) pidu komunitat, and kondisi Nagari yang diputusian dalam musyawarah Nagari; l) pengelokan musha kondisi Nagari yang diputusian dalam musyawarah Nagari e pengelokan usaha ekonomi produkti serta pengelokan usaha ekonomi produkti serta pengelokan sarana dan usaha petranian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi produkti serta pengelokan pada kelipakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman heras, d) pengelahan hara intawaran heras, d) pengelahan tanaman heras, d) pengelahan tanaman heras, d) pengelahan tanaman heras, d) pengelahan kara intawaran poduksi pertanian			
a) pengembangan energi terbarukan, antara lain: a) pengelahan imbah peternakan untuk energi biogas; b) pembatatah bioethanol dari ubik kayu; c) pengelahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesual dengan analisis kebuhuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam kondisi Nagari yang diputukan dalam kondisi Nagari yang diputukan dalam kondisi Nagari; d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi kondisi Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebuhuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam musyawarah Nagari c) pengelolaan ausha dekonomi produktif serta pengelolaan arana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan pranaksi usuha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk pertanian bin: a) pengelolaan produksi unggula, natara bin: b) pengelolaan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian bin: d) pengelolaan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk pertanian bin: d) pengelolaan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian bin: d) pengelaan pupuk; d) pembenihan kana kara; e) pengedaan pahan ternak; e) pengedaan pakan ternak; e) pengedaan pakan ternak; e) pengedaan pakan ternak; e) pengedaan pakan ternak;			
a) pengolahan imboh peternakan untuk energi biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodicsel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dara e) Pengembangan energi terbarukan lalannya yang sesusi dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputukan dalam musyawarah Nagari d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) aistem informasi dan komunikasi, antara lain: d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) aistem informasi dan komunikasi, antara lain: b) koran Magari; c) webite Nagari; d) radio komunitasi, dan dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang kebutuhan dan kebipakan satu Nagari satu pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan panga dan usaha pertanian untuk ketahanan panga dan usaha pertanian yang difukukan pangal dan usaha pertanian yang difukukan pangal dan usaha pertanian untuk ketahanan panga dan usaha pertanian untuk ketahanan panga dan usaha pertanian yang difukukan pangal dan banan pangangan; b) pengelolaan pipuliki dan pengelo	•		
biogas; b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi bioidesael; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyayawarah Nagari; d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; c) vebsite Nagari; d) radio komunitas; dan dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam muyayawarah Nagari; e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebututhan dan kondisi Nagari yang dipututskan dalam muyayawarah Nagari; c) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difiokuskan pada kelipikan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangar; b) pembibitan tanaman pangar; b) pembibitan tanaman pangar; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan pikult/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pikult/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan			
b) permbuatan bioerhand Idari ubi kayu; c) pengolahan minyak gorene bekas menjadi biodiesel; d) pengelolana pembangkil istrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi dan komunikasi, antara lain: b) koran Nagari; c) webste Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi laimnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang gibutuskan dalamusyawarah Nagari gibutuskan dalamusyawarah Nagari pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kelipikan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pengadaan pibiki/induk ternak; c) pengadaan pikal ternak; dan c) pengadaan palant ternak; dan c) pengadaan palant ternak; dan c) pengadaan palant ternaki pengadaan palant ternaki dan c) pengadaan palant ternaki pengadaan palant ternaki dan c) pengadaan palant ternaki			
c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi bioidisese; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kehutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kehutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari seladi kehutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari con pengelolaan produkti serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha petanian untuk ketahanan pangan dan usaha petanian untuk ketahanan pangan dan usaha petanian yang difikusukan pada musaha petanian yang difikusukan pada kebijakan astu Nagari satu produk unggulan, artara lain: a) pembibitan taraman pangan; b) pembibitan taramana keras; c) pengadaan pupuk; d) pengebenlaha ikan air tawar; e) pengadaan pikit/induk ternak; f) inseminasi buatara; g) pengadaan pakan ternak dan h) sarana dan prasaraan portouksi pertanian			
biodiesel; d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari e. pengelolaan insama din produktif serta pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan srana dan prasaranae konomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difotuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenlaha ikan air tawar; e) pengelolaan pupuk; d) pembenlaha ikan air tawar; e) pengadaan piliki/induk temak; l) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi petanlan			
d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawaria Nagari d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari vang diputuskan dalam musyawarah Nagari vang diputuskan dalam musyawarah Nagari e. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha bertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembilitan tanaman pengan; b) pembilitan tanaman peragan; b) pembilitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pemenhani kan air tawar; e) pengadaan palak ikan air tawar; e) pengadaan pakan ternak; dan			
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunikasi, dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarand anp pasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebipakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibatan tanaman pangan; b) pembibatan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) penembihatan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembibatan (panaman keras) c) pengadaan pupuk; d) penembihatan (panama keras) c) pengadaan palak intervat; e) pengadaan pakan ternak, dan	· ·		
e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari () pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; () website Nagar; () website Nagar; () radio komunitas; dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari () pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari () pengelolaan mada kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari () pengelolaan sana denomi produktif serta pengelolaan sana dan prasarana denomi () pengelolaan sana dan prasarana denomi () pengelolaan sana dan prasarana dan prasarana denomi () pengelolaan produktif serta pengelolaan sana dan prasarana tenomi () pengelolaan produktif serta pengelolaan produktif serta pengelolaan produktif serta () pengelo			
yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan musha ekonomi produktif serta pengelolaan rasana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan prataki susha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman pangan; d) pemberilanan ikan air tawar; e) pengadaan pubuk; d) pemberilanan ikan air tawar; e) pengadaan pubuk; g) pengadaan pakan ternak; dan			
kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembilotian tanaman pengan; b) pembilotian tanaman pengan; c) pengadaan putok; d) penbenihan ikan air tawar; e) pengadaan pibit/induk ternak; f) inseminasi buutan; g) pengadaan pikan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
musyawarah Nagari 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Magari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunikas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembilitan tanaman pangan; b) pembilitan tanaman keras; c) pengadaan pubuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan plakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarand anp prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembilitan tanaman pangan; b) pembilitan tanaman keras; c) pengadaan puksi; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan piki/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasaranan produksi pertanian			
lain: a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan asana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pukan tanaman; b) pembibitan itanaman keras; c) pengadaan pukan itawar; e) pengadaan pikan terwar; e) pengadaan pikan prasarana produksi pertanian			
a) sistem informasi Nagari; b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
b) koran Nagari; c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diptutskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
c) website Nagari; d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
d) radio komunitas; dan e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan pibit/finduk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan pibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
diputuskan dalam musyawarah Nagari c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
produk unggulan, antara lain: a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
a) pembibitan tanaman pangan; b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian	difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu		
b) pembibitan tanaman keras; c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
c) pengadaan pupuk; d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian	 a) pembibitan tanaman pangan; 		
d) pembenihan ikan air tawar; e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
e) pengadaan bibit/induk ternak; f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
f) inseminasi buatan; g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
g) pengadaan pakan ternak; dan h) sarana dan prasarana produksi pertanian			
h) sarana dan prasarana produksi pertanian	f) inseminasi buatan;		
	g) pengadaan pakan ternak; dan		
lainnya yang sesuai dengan analisis			
	lainnya yang sesuai dengan analisis		

	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
2)	pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk		
-,	ketahanan pangan dan usaha pertanian yang		
	difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu		
	produk unggulan, antara lain:		
	a) tepung tapioka;		
	b) kerupuk;		
	c) keripik jamur;		
	d) keripik jagung;		
	e) abon sapi;		
	f) susu sapi;		
	g) coklat;		
	h) karet; dan		
	i) pengolahan hasil pertanian lainnya yang		
	sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi		
	Nagari yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
3)	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang		
	difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu		
	produk unggulan, antara lain:		
	a) meubelair kayu dan rotan,		
	b) alat-alat rumah tangga,		
	c) pakaian jadi/konveksi		
	d) kerajinan tangan;		
	e) kain tenun;		
	f) kain batik;		
	g) bengkel kendaraan bermotor;		
	h) pedagang di pasar;		
	i) pedagang pengepul; dan		
	j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya		
	yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan		
	kondisi Nagari yang diputuskan dalam		
	musyawarah Nagari.		
4)	pendirian dan pengembangan BUMNagari		
,	dan/atau BUMNagari Bersama, antara lain:		
	a) pendirian BUMNagari dan/atau BUMNagari		
	Bersama;		
	b) penyertaan modal BUMNagari dan/atau		
	BUMNagari Bersama; dan		
	c) penguatan permodalan BUMNagari dan/atau		
	BUMNagari Bersama		
5)	pengembangan usaha BUMNagari dan/atau		
3)	BUMNagari Bersama yang difokuskan pada		
	kebijakan satu Nagari satu produk unggulan,		
	antara lain:		
	a) industri air minum;		
	b) industri pariwisata Nagari;		
	c) industri pengolahan ikan; dan		
	d) industri kreatif atau ekonomi kreatif		
	e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		

	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
6)	pengembangan usaha BUMNagari dan/atau		
O)	BUMNagari Bersama yang difokuskan pada		
	pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:		
	a) pembangunan dan penyewaan sarana		
	prasarana olahraga;		
	b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;		
	c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;		
	dan		
	d) pengadaan atau pembangunan sarana		
	prasarana lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
7)	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi		
	masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan		
	kepada kebijakan satu Nagari satu produk		
	unggulan, antara lain:		
	a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;		
	b) bantuan sarana produksi, distribusi dan		
	pemasaran untuk usaha ekonomi		
	masyarakat; dan		
	c) pembentukan dan pengembangan usaha		
	ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
8)	pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat		
0)			
	Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang		
	difokuskan kepada kebijakan satu Nagari satu		
	produk unggulan, antara lain:		
	a) sosialisasi TTG;		
	b) pelatihan TTG;		
	c) pos pelayanan teknologi Nagari		
	(Posyanteknag) dan/atau antar Nagari		
	d) percontohan TTG untuk produksi pertanian,		
	pengembangan sumber energi,		
	pengembangan sarana transportasi dan		
	komunikasi serta pengembangan jasa dan		
	industri kecil; dan		
	e) pengembangan dan pemanfaatan TTG		
	lainnya yang sesuai dengan analisis		
	kebutuhan dan kondisi Nagari yang		
	diputuskan dalam musyawarah Nagari		
9)	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM		
-,	Nagari dan usaha ekonomi lainnya yang		
	difokuskan pada kebijakan satu Nagari satu		
	produk unggulan, antara lain:		
	a) penyediaan informasi harga/pasar;		
	b) pameran hasil usaha BUM Nagari, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;		
	c) kerjasama perdagangan antar Nagari;		
	d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;		
	dan		

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
Nagari yang diputuskan dalam musyawarah Nagari d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
Nagari d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Nagari dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
yang meliputi: 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
alam; 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
menghadapi bencana alam; 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan	
hancana alamudan	
bencana alam; dan	
4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi	
Nagari yang diputuskan dalam musyawarah	
Nagari	
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:	
1) pembibitan pohon langka;	
2) reboisasi;	
3) rehabilitasi lahan gambut;	
5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis	
kebutuhan dan kondisi Nagari yang diputuskan	
dalam musyawarah Nagari	
f. Pemberdayaan masyarakat Nagari untuk memperkuat	
tata kelola Nagari yang demokratis, antara lain:	
1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam	
perencanaan dan pembangunan Nagari yang	
dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari,	
antara lain:	
a) pengembangan sistem informasi Nagari;	
b) pengembangan pusat kemasyarakatan	
atau balai rakyat; dan	
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan	
analisis kebutuhan dan kondisi Desa	
yang diputuskan dalam musyawarah	
Nagari.	
2) Mengembangkan program dan kegiatan	
pembangunan Nagari secara berkelanjutan	
dengan mendayagunakan sumber daya	
manusia dan sumber daya alam yang ada di	
Nagari, antara lain:	
a) penyusunan arah pengembangan	
Nagari;	
b) penyusunan rancangan penggam/kagiatan pembangunan Nagari	
program/kegiatan pembangunan Nagari	
yang berkelanjutan; dan	
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan	
analisis kebutuhan dan kondisi Nagari	
yang diputuskan dalam musyawarah	
Nagari	

3)	Menyusun perencanaan pembangunan Nagari		
-,	sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai		
	kearifan lokal, antara lain:		
	a) pendataan potensi dan aset Nagari;		
	b) penyusunan profil Nagari/data Nagari;		
	c) penyusunan peta aset Nagari; dan		
	d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
4)	Menyusun perencanaan dan penganggaran		
	yang berpihak kepada kepentingan warga		
	miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,		
	dan kelompok marginal, antara lain:		
	 a) sosialisasi penggunaan dana Nagari; 		
	b) penyelenggaraan musyawarah		
	kelompok warga miskin, warga;		
	c) disabilitas, perempuan, anak, dan		
	kelompok marginal;		
	d) penyusunan usulan kelompok warga		
	miskin, warga disabilitas, perempuan,		
	anak, dan kelompok marginal; dan		
	e) kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
-/	Nagari		
5)	Mengembangkan sistem transparansi dan		
	akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan		
	dan pemberdayaan masyarakat Nagari, antara		
	lain:		
	a) pengembangan sistem administrasi		
	keuangan dan aset Nagari berbasis data		
	digital;		
	b) pengembangan laporan keuangan dan		
	aset Nagari yang terbuka untuk publik;		
	c) pengembangan sistem informasi Nagari;		
	dan		
	d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
6)	Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan		
٠,	Nagari dan lembaga adat, antara lain:		
	a) pengembangan lembaga		
	lembaga adat;		
	b) pelatihan pengurus lembaga		
	kemasyarakatan Nagari dan/atau		
	lembaga adat; dan		
	c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		

	Nagari		
7)	Mendorong partisipasi masyarakat dalam		
,	penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan		
	melalui musyawarah Nagari, antara lain :		
	a) penyebarluasan informasi kepada		
	masyarakat Nagari perihal hal-hal		
	strategis yang akan dibahas dalam		
	Musyawarah Nagari;		
	b) penyelenggaraan musyawarah Nagari;		
	dan		
	c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
8)	Melakukan pendampingan masyarakat Nagari		
	yang berkelanjutan, antara lain:		
	 a) pelatihan kepemimpinan; 		
	b) pembentukan kader pemberdayaan		
	masyarakat Nagari;		
	c) pelatihan kader pemberdayaan		
	masyarakat Nagari; dan		
	d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan		
	analisis kebutuhan dan kondisi Nagari		
	yang diputuskan dalam musyawarah		
	Nagari		
9)	Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan		
	kapasitas sumber daya manusia masyarakat		
	Nagari untuk pengembangan Lumbung Pitih		
	Nagari yang difokuskan pada kebijakan satu		
	Desa satu produk unggulan, antara lain:		
	a) pelatihan usaha pertanian, perikanan,		
	perkebunan, industri kecil dan		
	•		
	perdagangan		
	b) pelatihan manajemen Simpan Pinjam		
	Pola Konvensional atau pola syariah;		
	c) pelatihan pembentukan dan		
	pengembangan koperasi;		
	d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi		
	masyarakat Nagari, antara lain:		
	1. warga Nagari pengelola usaha		
	ekonomi produktif;		
	tenaga kerja usia produktif;		
	3. kelompok usaha ekonomi		
	produktif;		
	kelompok perempuan;		
	kelompok pemuda;		
	kelompok tani;		
	kelompok perajin; dan		
	8. warga Nagari dan/atau		
	kelompok yang lainnya sesuai		
	kondisi Nagari		
	S S		
	e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya		

		T	-
untuk pengembangan dan penguatan			
kebijakan satu Nagari satu produk			
unggulan yang sesuai dengan analisis			
kebutuhan dan kondisi Nagari yang			
diputuskan dalam musyawarah Nagari	'		
10) Melakukan pengawasan dan pemantauan	'		
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan	'		
pembangunan Nagari yang dilakukan secara	'		
partisipatif oleh masyarakat Nagari, antara lain:	'		
a) Pemantauan berbasis komunitas;	'		
b) Audit berbasis komunitas;	'		
c) Pengembangan unit pengaduan di	'		
	'		
Nagari; d) Pengembangan bantuan hukum dan	'		
	'		
paralegal untuk penyelesaian masalah	,		
secara mandiri oleh Nagari;			
e) Penyelenggaraan musyawarah Nagari			
untuk pertanggungjawaban dan serah	'		
terima hasil pembangunan Nagari; dan	'		
f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan	'		
analisis kebutuhan dan kondisi Nagari	'		
yang diputuskan dalam musyawarah	'		
Nagari			
	'		Pasal 12.A
	'		(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
	'		dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan
	'		mekanisme swakelola.
	'		(2) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan Dana
	'		Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	'		harus melakukan <i>Refocusing</i> .
	'		(3) Refocusing sebagaimana dimaksud pada ayat
	,		(2) dilakukan pada 3 (tiga) sampai dengan 5
	'		
	'		(lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	,		Nagari.
	'		(4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan
	,		pembangunan Nagari wajib digunakan untuk
			membayar upah masyarakat paling sedikit 30 %
			(tiga puluh persen).
			(5) Upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada
			ayat (4) dibayar secara harian atau mingguan.
Bagian Keempat	Tetap	Tetap	Pasal 13
Pengelolaan Dana Desa			(1) Pelaksanaan Dana Desa dikelola oleh:
Paragraf 1			a. Wali Nagari; dan
Umum			b. PTPKN.
Pasal 13			(2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana
(1) Pelaksanaan Dana Desa dikelola oleh:			dimaksud pada ayat (5) pelaksanaan swakelola
a. Wali Nagari;			Dana Desa dilaksanakan oleh TPK.
b. PTPKN; dan			(3) Untuk perencanaan dan pelaksanaan teknis
c. Bendahara.			yang tidak sanggup disusun dan dilaksanakan
(2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud			oleh TPK, maka TPK dapat memanfaatkan
pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh:			tenaga teknis di luar TPK dan diutamakan
a. TPK;			_
a. IFN,	<u></u>		sumber daya lokal yang ada atau yang berasal

b. TPM;			dari Pegawai Negeri Sipil maupun swasta sesuai
c. Tim Teknis Nagari; dan d. Tim Verifikasi Kegiatan			dengan keahlian dibidangnya. (4) TPK menyerahkan dan melaporkan semua kegiatan termasuk hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
			(5) Dalam memantau pelaksanaan kegiatan berjalan menurut semestinya, Wali Nagari membentuk TPM.
Pasal 14 (1) Bendahara Nagari di jabat oleh staf pada Urusan	Tetap	Tetap	Pasal 14 (1) Bendahara Nagari di jabat oleh staf pada
Keuangan Nagari			Urusan Keuangan Nagari
(2) Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			 Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Nagari dan Pengeluaran Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpan uang tunai yang diterimanya dalam brangkas pada hari kerja paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam hal uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp.10.000.000,-Bendahara membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara dan Wali Nagari.
Paragraf 2	Tetap	Tetap	Pasal 15 dihapus.
TPK Pasal 15			
(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur-unsur: a. Perangkat Nagari b. Kelembagaan Masyarakat			
c. Masyarakat Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah: a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal: 1. pembuatan rencana kerja detail (Scedule) dan Rencana Penggunaan Dana untuk pelaksanaan			
kegiatan; 2. penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses			
pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan yang berlaku			
menggunakan tenaga kerja yang berasal dari			

	nagari bersangkutan dan diutamakan dari			
	rumah tangga miskin			
	5. pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan			
	kemudian mengajukan sertifikasi untuk			
	mendapat persetujuan dari Tim Teknis			
	6. pengawasan dan pengendalian kualitas			
	pekerjaan,			
	7. pembuatan laporan			
	b. Menyelenggarakan musyawarah Nagari yang			
	diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka			
	perubahan kegiatan jika terjadi perubahan			
	pekerjaan,			
	c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan			
	pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan			
	pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan			
	musyawarah dan menempelkan data di papan			
	informasi			
1	d. Menyelenggarakan dan melaporkan			
	pertanggungjawaban kegiatan serta penggunaan			
	dana dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana			
	Desa kepada PTPKN melalui pertemuan musyawarah			
	Nagari			
	e. TPK bersama Tim Teknis dan Tim Pemantau			
	Masyarakat melaksanakan sertifikasi pekerjaan			
(3)	TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan			
	dengan Keputusan Wali Nagari dan dibentuk sesuai			
	dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan, paling			
	sedikit satu TPK di bidang Pembangunan dan satu TPK di			
	bidang Pemberdayaan Masyarakat;			
(4)	TPK di Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud			
	pada ayat (3) dapat melaksanakan kegiatan yang dibiayai			
	dari ADN.	_		
Parag	rat 3	Tetap	Tetap	Pasal 16 dihapus
TPM	1.0			
Pasal				
(1)	TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)			
	huruf b, terdiri dari unsur :			
	a. Lembaga Nagari b. Masyarakat.			
(2)	TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai			
(2)	tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :			
	a. memantau dan membantu penyebarluasan			
	informasi termasuk pembaharuan informasi di			
	papan informasi;			
	b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan			
	administrasi TPK;			
	c. memantau dan mengawasi penyelenggaraan			
	musyawarah pertanggung jawaban dan serah			
	terima;			
	d. memantau dan memeriksa setiap penarikan dana			
1	dari Bendahara Nagari serta setiap transaksi			
1				
ł	pembayaran/pengeluaran dana dari TPK;			

e. memantau dan memeriksa pekerjaan, bahan dan			
alat yang dibeli atau disewa;			
f. menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan			
meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat			
dan Desa apabila tidak ada penyelesaian;			
g. TPM bersama TPK dan Tim Teknis melaksanankan			
sertifikasi pekerjaan; dan			
h. menyampaikan hasil pemantauannya kepada			
masyarakat pada saat musyawarah			
(3) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan			
dengan Keputusan Wali Nagari;			
Paragraf 4	Tetap	Tetap	Pasal 17 dihapus
Tim Teknis Nagari			
Pasal 17			
(1) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13			
ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab :			
a. bersama TPK dan Masyarakat melakukan Survei			
lapangan untuk penyiapan Nagari dan RAB;			
b. bersama TPK dan Masyarakat membuat desain			
Nagari dan RAB;			
c. mendampingi TPK dan masyarakat dalam			
pelaksanaan kegiatan;			
d. bersama TPK, Tim Pemantau masyarakat dan			
masyarakat melakukan sertifikasi pekerjaan; dan			
e. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wali Nagari.			
(2) Tim Teknis Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;	_	_	- 1 - 1
Paragraf 5	Tetap	Tetap	Pasal 18 dihapus
Tim Verifikasi Kegiatan			
Pasal 18			
(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat			
(2) huruf d, mempunyai tugas dan tanggung jawab :			
a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan			
kegiatan yang diajukan dan disesuaikan dengan			
dokumen perencanaan;			
b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa			
kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di			
lapangan;			
c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan			
tujuan dana Nagari;			
d. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan			
usulan kegiatan;			
e. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil			
pemeriksaan usulan kegiatan kepada Wali Nagari			
melalui PTPKN;			
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;			
Bagian Kelima	Tetap	Tetap	Tetap
Mekanisme Penyaluran Dana Desa	ιειαρ	ιειαμ	ιτιαμ
Pasal 19			
(1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan			
pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari dan	l		

	dilaksanakan berdasarkan asas-asas transparan,			
	akuntable, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan			
	disiplin anggaran.			
(2)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituangkan dalam APB			
\-/	Nagari.			
(3)	Setelah APBNagari ditetapkan Pemerintah Nagari wajib			
(5)	menyampaikan APBNagari kepada Bupati melalui Camat			
(4)				
(4)	Apabila APBNagari tidak disampaikan sebagaimana			
	dimaksud pada ayat (3) maka penyaluran Dana Desa			
	dapat ditangguhkan.	_	_	- 1 11
Pasal 2		Tetap	Tetap	Pasal 20 dihapus
(1)	Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan			
	ketentuan sebagai berikut:			
	a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen); dan			
	 tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen). 			
(2)	Mekanisme penyaluran Dana Desa Tahap I disalurkan dari			
	Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari,			
	setelah Bupati menerima:			
	a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan			
	b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun			
	Anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.			
(3)	Penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum			
(3)	Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah Bupati			
	menerima laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap			
	I dari Wali Nagari;			
(4)	· ·			
(4)	Laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I			
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan			
	paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar			
	50 % (Lima Puluh Persen).			
Pasal 2		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Nagari ke TPK			
	harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal			
	pelaksanaan kegiatan			
(2)	Kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan			
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam			
	Rencana Penggunaan Dana yang disiapkan oleh TPK			
	untuk selanjutnya diverifikasi oleh PTPKN.			
(3)	Penyaluran Dana Desa ke TPK diserahkan kepada			
	Bendahara TPK dengan melampirkan :			
	- managed breisten ware besigiten DAD Debesiese			
	a. proposal kegiatan yang berisikan RAB Pekerjaan			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis;			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana;			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan;			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%;			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan			
	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan			
(0)	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK;			
(4)	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK; Setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK			
(4)	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK; Setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa			
(4)	yang telah disahkan oleh Tim Teknis; b. Rencana Penggunaan Dana; c. schedule Pelaksanaan Pekerjaan; d. foto awal atau foto kondisi 0%; e. keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK Kegiatan; dan f. Surat Perjanjian Kerja antara Wali Nagari dengan TPK; Setiap pengajuan penyaluran dana tahap berikutnya, TPK			

sebelumnya telah digunakan sebesar 50 % (Imma Puluh Perseni); (5) Serteiha kegistan selesai 100 % (Seratus Persen) persen, Tim Terkinis dan TPM melakukan sertifikasi terhadap kegistan yang telah dilaksanakan; (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sebeguiman dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima. Biaya Operasional Kegistan Biaya Operasional Kegistan Pembaguan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional Registan Pasal 22 Pagglolsan Kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembaguan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional Registan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di diterapkan sebesar 6,5% dari Aloksia Dana Kegistan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PEPN (1.5%) b. Biaya Operasional PEPN (1.5%) c. Biaya Operasional PEPN (1.5%) d. Biaya Operasional PEPN (1
Setelah kegistan selesai 100 % (Sertitaks Jernadap kegistan yang telah dilaksanakan; Sertitaks Jernadap kegistan yang telah dilaksanakan; Selah Kenam Silaya Operasional Kegistan Bajara Keenam Silaya Operasional Kegistan Dana Desa untuk Bidang Pentagungan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional kegistan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan disertai dengan Bilaya Operasional PPRN : 0,5% D. Bilaya Operasional PPRN : 0,5% D. Bilaya O
Tim Teknis dan TPM melakukan setrifikasi terhadap kegistan yang felsh dilaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima. Bagian Keenam Biaya Operasional Kegiatan Pasal 22 (3) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6.5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional Regiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ditetapkan sebesar 6.5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional TPK : 3.% b. Biaya Operasional TPK : 3.% c. Biaya Operasional TPK : 3.% d. Biaya Opera
kegitatn yang telah diaksanakan; (5) diaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima. Bagian Keenam Biaya Operasional Kegitatan Bagian Keenam Biaya Operasional Kegitatan Bagian Keenam Biaya Operasional Kegitatan Panal 22 (1) Pengelolaan Magiatan Dana Desa untuk Bidang Pembaguan dan Pemberdayaan disterial dengan Biaya Operasional kegitatan, Operasional kegitan, Operasional kegitatan, Operasional PTP(N 10,5%, D. Biaya Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional Kegitatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar (5,5% dari Alokasi Dana kegitatan dengan rindian sebagah berikut: Operasional PTP(N 10,5%, D. Biaya Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional PTP(N 10,5%, D. Biaya Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional PTP(N 10,5%, D. Biaya Operasional Tim Felinis: 2%, Operasional PTP(N 10,5%,
Go Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksankan sebelum Musyawarah Serah Terima.
dilaksanakan sebelum Musyawarah Serah Terima. Bagian Keenam Baya Operasional Kegiatan Pasal 22 (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembaguan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parangunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagai parang direksud pada ayat (1) di ditetapkan sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTKN: 0.5% b. Biaya Operasional Tim Verliksis: 0.5% d. Biaya Operasional Tim Verliksis: 0.5% d. Biaya Operasional Tim Verliksis: 0.5% d. Biaya Operasional PTKN: 0.5% b. Biaya Operasional Kegiatan sebagaiman direksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya operasional Kegiatan sebagaiman direksud pada ayat (3) di ditetapkan sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTKN: 0.5% d. Biaya Operasional PTKN: 0.5% b. Biaya Operasional
Bagian Kecnam Pasal 22 (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan (2) Biaya Operasional kegiatan bana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebagai berniut a. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% b. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% c. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% d. Biaya O
Bagian Kecnam Pasal 22 (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan (2) Biaya Operasional kegiatan bana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebagai berniut a. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% b. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% c. Biaya Operasional PTFKN: 0,5% d. Biaya O
Biaya Operasional Kegiatan Penabagunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertal dengan Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetaphan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetaphan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN 10,5% b. Biaya Operasional TPKN 10,5% d. Biaya Operasional TITM terdikasi 0,5% d. Biaya Operasional ter
Pasal 22 (1) Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional Regiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPN: 0,5% b. Biaya Operasional TPM: 1,0,5% d. Biaya Oper
1 Pengelolaan Kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembegruan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan Dana Desa untuk Bidang Pembagnuan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional FPKN 1.0,5% b. Biaya Operasional TPKN 1.0,5% c. Biaya Operasional TITM Exist: 2% d. Biaya Operasional Explatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d) Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d) Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d) Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d) Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d) Biaya Operasional Fix (2) & Biaya Operasional Fix (3) & Biaya Operasional Fix (4) & Biaya Operasional Fix (4) & Biaya Operasiona
Pembagunan dan Pemberdayaan disertai dengan Biaya Operasional kegiatan. Qerasional kegiatan. (2) Biaya Operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rindian sebagai berikut: a. Biaya Operasional FPKN: 0,5% b. Biaya Operasional TPK: 3% c. Biaya Operasional TPK: 3% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 10,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya enturik biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6
Operasional keglatan. (2) Biaya Operasional keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPK 10,5% b. Biaya Operasional TPK 13% c. Biaya Operasional TPK 13% d. Biaya Operasional TPM 10,5% d. Biaya Oper
2 Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan sebasar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTRN 1.0,5% b. Biaya Operasional PTRN 1.0,5% b. Biaya Operasional TRN 1.3% c. Biaya Operasional TRN 1.3% d. Biaya Operasional TRN 1.0,5% d. Biaya Operasional TRN 1.0
ayat (1) di ditetapkan sebesar 6,5% dari Alokasi Dana Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional FTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional FTPKN: 0,5% c. Biaya Operasional TTPK : 3% c. Biaya Operasional TTPK : 3% d. Biaya Operasional TTPM: 2,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5% e. Biaya Operasional TTPM: 0,5% d. Biaya Operasional TTPM: 0,5%
Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional TPK: 3% c. Biaya Operasional TPK: 3% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% b. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TP
a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional TPK: 3 % c. Biaya Operasional TPK: 3 % d. Biaya Operasional TIM exinis: 2% d. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% e. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% e. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% d. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% e. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% d. Biaya Operasional TIM Verifikasi: 0,5% e. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya Operasional TIM (egitatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai berikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai berikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai berikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud dahan tuntuk Alokasi Dana Kegiatan sebagai mana dibawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud dahan tuntuk Alokasi Dana Kegiatan sebagai mana dibawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dibawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai perikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud dahan 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5% dengan rincian sebagai perikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya derikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya derikut: a. Biaya Operasional TIM (egitatan sebagai
b. Biaya Operasional TPK : 3 % c. Biaya Operasional TPM : 0,5% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya Operasional TIM reknis: 2% Biaya Operasional TIM reknis: 2% b. Biaya Operasional TIM reknis: 2% c. Biaya Operasional TIM: 0,5% e. Biaya Operasional TIM reknis: 2% d. Biaya Operasional TIM reknis: 2% dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya administrasi, biaya administrasi, biaya administrasi, biaya administrasi, biaya administrasi, biaya operasional Regiatan debagaiman dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya deministrasi, biaya administrasi, biaya operasional Regiatan dengan
c. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% e. Biaya Operasional TPM: 0,5% d. Biaya Operasional TPM: 0,5% dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional metal Alexandrian dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. d. Biaya operasional metal bawah atau sama dengan RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional TPM: 0,5% b. Biaya Operasional TPM:
d. Biaya Operasional TPM : 0,5% e. Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% (3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional kegiatan dengan Alokasi Dana dibawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional Megiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional untuk Alokasi Dana Kegiatan di bawah atau sama dengan RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A dihapus
e. Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% (3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional Regiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% b. Biaya Operasional Megiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% b. Biaya Operasional Kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Verifikasi : 0,5% claya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional untuk Alokasi Dana Kegiatan di bawah atau sama dengan RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 3,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A dihapus Pasal 22.A dihapus Pasal 22.A dihapus
(3) Biaya operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A dihapus Baya Operasional Tim Teknis: 2% Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A dihapus Pasal 22.A dihapus Pasal 22.A dihapus
ayat (2) digunakan untuk biaya rapat, biaya administrasi, biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional untuk Alokasi Dana Kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
biaya pelaporan, biaya Transportasi dan Honorarium. (4) Biaya operasional kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(4) Biaya operasional kegiatan dengan Alokasi Dana di bawah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagai mana dimaksud dalam Pasal
15.000.000 (lima belas juta rupiah), ditetapkan sebesar 2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2,5% dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Operasional PTPKN : 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagai mana dimaksud dalam Pasal
a. Biaya Operasional PTPKN: 0,5% b. Biaya Operasional Tim Teknis: 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
b. Biaya Operasional Tim Teknis : 2% Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Bagian Ketujuh Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Sanksi Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pasal 22.A (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2);
b. Terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya lenih dari 30% (tiga puluh persen)
pada Rekening Kas Nagari; dan/atau
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas
fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas
Nagari tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal sisa Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya pada Rekening Kas Nagari lebih besar
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak
tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening	
Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih	
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana	
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat	
(2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Desa di RKUD.	
(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan	
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)	
kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK	
Fisik dan Dana Desa.	
(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana	
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan	
kembali pada tahun anggaran berikutnya.	
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf c disampaikan oleh aparat pengawas	
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi	
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran	
dan/atau penggunaan Dana Desa.	
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)	
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan	
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK	
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan	
penyaluran.	
Pasal 22.B	Dagal 22 D dibanus
	Pasal 22.B dihapus
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang	
ditunda dalam hal:	
a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah	
diterima;	
b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun	
anggaran sebelumnya kurang dari atau sama	
dengan 30%; dan	
c. Terdapat usulan dari aparat pengawas	
fungsional daerah.	
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa	
sebaimana dimaksud dalam Pasal 22.A ayat (1) huruf	
a dan huruf c berlangsung sampai dengan	
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat	
disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menajdi	
sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.	
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas	
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK	
Fisik dan Dana Desa.	
(4) Bupati memberitahukan kenada Wali Nagari yang l	
(4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam	
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.	

	pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan. (7) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara	
	Umum Negara.	
	Pasal 22.C (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.A ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen). (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK, Fisik dan Dana Desa.	Pasal 22.C dihapus
	Pasal 22. D	Pasal 22.D dihapus

		(1) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Desa dalam hal terdapat: a. pemberitahuan perbedaan jumlah Nagari dari bupati; b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. A ayat (5) dan Pasal 22. B ayat (3); dan/ atau c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. C ayat (3) (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan. (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan	
		pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
BAB VII ADN Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah untuk membiayai program pemerintahan nagari dalam melaksanakan kegiatan: a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; b. bidang penksanaan pembangunan Nagari; c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari; d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; d. bidang terduga. (2) Pengelolaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Nagari di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Nagari.	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kedua	Tetap	Tetap	Tetap
Tujuan ADN			
Pasal 24			
ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai			
tujuan:			
a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;			
b. pembinaan kemasyarakatan;			
c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nagari;			
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan			
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;			
e. pengembangan kemandirian dan kesejahteraan			
Masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, sikap,			
keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran;			
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Nagari dalam			
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi			
0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1			

	masyarakat;			
g.	mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong			
	masyarakat; dan			
h.	meningkatkan pendapatan Nagari dan masyarakat Nagari			
	melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).			
Bagia	n Ketiga	Tetap	Tetap	Tetap
Pengg	unaan ADN	•	,	·
Pasal				
Pengg	unaan ADN mengacu pada RPJM Nagari dan RKP Nagari.			
Pasal		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	•	,	,
` '	digunakan untuk membiayai:			
	a. penghasilan tetap dan tunjangan aparatur			
	Pemerintahan Nagari dan lembaga Nagari lainnya;			
	b. belanja operasional pemerintah dan lembaga			
	Nagari;			
	c. belanja kewenangan lokal berskala Nagari yang			
	meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,			
	pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan			
	kemasyarakatan, pembinaan keagamaan dan			
	pemberdayaan masyarakat Nagari; dan			
	d. belanja penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan			
	BAMUS Nagari;			
(2)	Penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Nagari			
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat			
	dibayarkan secara Lump Sum setiap bulan;			
(3)	Ketentuan terkait pembayaran penghasilan tetap			
	aparatur Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan			
	Peraturan dan Keputusan Bupati.			
(4)	Kriteria kewenangan lokal berskala Nagari sebagaimana			
	dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:			
	a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan			
	pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;			
	b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan			
	dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan			
	masyarakat Nagari yang mempunyai dampak internal Nagari;			
	c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan			
	kepentingan sehari-sehari masyarakat Nagari;			
	d. kegiatan yang telah di jalankan oleh Nagari atas			
	dasar prakarsa Nagari;			
	e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,			
	dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah			
	diserahkan dan dikelola oleh Nagari; dan			
	f. kewenangan lokal berskala Nagari sesuai ketentuan			
(E)	yang berlaku. Kagiatan yang telah didapai ADN tidak dibolehkan lagi			
(5)	Kegiatan yang telah didanai ADN tidak dibolehkan lagi			
(6)	didanai oleh sumber dana lainnya.			
(6)	Pedoman dan standar biaya Penyelenggaraan pemilihan			
	Wali Nagari dan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud			
	pada ayat (1) huruf d lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;			
L	r ci aturan uan/atau keputusan bupati,			

Bagian Kaampat	Totan	Totan	Pasal 27
Bagian Keempat	Tetap	Tetap	
Pengelolaan ADN			(1) Pelaksanaan ADN dikelola oleh :
Pasal 27			a. Wali Nagari; dan
(1) Pelaksanaan ADN dikelola oleh :			b. PTPKN.
a. Wali Nagari;			(2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana
b. PTPKN; dan			dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan ADN
c. Bendahara.			dilaksanakan oleh TPK.
(2) Selain Wali Nagari dan PTPKN sebagaimana dimaksud			(3) TPK menyerahkan dan melaporkan semua
pada ayat (1) pelaksanaan Dana Desa didukung oleh :			kegiatan termasuk hasil pengadaan Barang/Jasa
a. TPK;			kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara
b. TPM;			Serah Terima Hasil Pekerjaan.
c. Tim Teknis Nagari; dan			(4) Dalam memantau pelaksanaan kegiatan
(3) Tim Verifikasi Kegiatan.			berjalan menurut semestinya, wali nagari membentuk TPM.
Pasal 28	Tetap	Tetap	Tetap
Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan nagari sebagaimana	ιειαμ	Tetap	ietah
dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara			
mutatis mutandis terhadap pengelolaan ADN			
Bagian Kelima	Tetap	Tetap	Pasal 29
Mekanisme Penyaluran ADN			(1) Mekanisme penyaluran ADN Tahap I dari
Pasal 29			Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
(1) Mekanisme penyaluran ADN Tahap I dari Rekening Kas			Nagari dilakukan setelah Bupati menerima:
Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah			 a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
Bupati menerima:			b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;			c. Nomor rekening kas Nagari;
 b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; 			d. Melampirkan SPJ Tahun sebelumnya;
c. nomor rekening kas Nagari;			e. Surat pengantar/ rekomendasi Camat
d. melampirkan SPJ Tahun sebelumnya;			untuk pencairan dana.
			· ·
e. Surat pengantar/rekomendasi Camat untuk			
pencairan dana;			Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
f. Surat tanda terima penyerahan RAB kepada Camat			Nagari dilakukan setelah Bupati menerima
dan Pendamping Lokal Desa atau Pendamping Desa			laporan realisasi dan SPJ penggunaan ADN
atau Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.			Tahap sebelumnya dari Wali Nagari;
(2) Penyaluran ADN tahap selanjutnya dari Rekening Kas			(2.a) Dalam hal penyaluran pembayaran
Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari dilakukan setelah			penghasilan tetap Wali Nagari dan
Bupati menerima laporan realisasi dan SPJ penggunaan			Perangkat Nagari, Tunjangan Pengelola
ADN Tahap sebelumnya dari Wali Nagari;			Keuangan Nagari dan Belanja untuk
(3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak			kebutuhan listrik, telepon, air dan ATK
lengkap dan tidak benar maka SPP bulan berikutnya tidak			dapat dibayarkan setiap bulan setelah
dapat di proses.			Bupati menerima:
(4) Pencairan ADN dapat dilakukan per triwulan dan surat			a. SPP;
permintaan pembayaran sudah harus masuk paling			b. Keputusan Bupati tentang besaran
lambat minggu pertama di bulan pertama			penghasilan tetap;
lambat mingga pertama ai balah pertama			c. Surat pengantar/rekomendasi
			. •
			Camat; dan
			d. Rekomendasi Kepala Dinas
			Pemberdayaan Masyarakat dan
			Desa.
			(3) Apabila SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat
			(1) tidak lengkap dan tidak benar maka SPP
			bulan berikutnya tidak dapat di proses.
			(4) Pencairan ADN dapat dilakukan tiap bulan
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

	<u>, </u>		
			dan/atau per triwulan dan SPP sudah harus masuk paling lambat minggu pertama pada
			bulan yang bersangkutan.
Pasal 30	Tetap	Tetap	Tetap
Surat Pengantar/Rekomendasi dari Camat untuk permintaan			
ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e			
dilampiri dengan:			
a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Desa dan ADN			
bulan sebelumnya;			
b. Surat permintaan pembayaran belanja tidak langsung Pemerintah Nagari yang dilampiri dengan rincian rencana			
penggunaan; c. Surat permintaan pembayaran belanja langsung yang			
c. Surat permintaan pembayaran belanja langsung yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dan			
dokumentasi kegiatan pembangunan; dan			
d. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dan			
ADN.			
Pasal 31	Tetap	Tetap	Tetap
ADN yang tidak ditransfer ke rekening Pemerintah Nagari karena	Tetap	Τεταρ	retap
Pemerintah Nagari tidak dapat atau tidak mampu memenuhi			
persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29			
ayat (1) menjadi sisa Anggaran Pemerintah Daerah dan tidak bisa			
dimintakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.			
Pasal 32	Tetap	Tetap	Tetap
(1) ADN yang telah dialokasikan dalam APBD seluruhnya			
menjadi hak Pemerintahan Nagari.			
(2) Besaran Alokasi Dana untuk tiap-tiap Nagari ditetapkan			
dengan Keputusan Bupati.			
(3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan.			
(4) Apabila terjadi kelebihan Dana pada salah satu pos			
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan menjadi			
sisa pada tahun yang bersangkutan.			
	Bagian Keenam	Tetap	Tetap
	Biaya Operasional Kegiatan		
	Pasal 32.A		
	Ketentuan mengenai biaya operasional kegiatan sebagaimana		
	dimaksud dalam pasal 22 berlaku secara mutandis terhadap biaya		
DADAW	operasional kegiatan yang dananya berasal dari ADN.		- .
BAB VIII REKENING KAS UMUM PEMERINTAH NAGARI	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 33			
(1) Dalam penyaluran Dana Desa dan ADN, Wali Nagari			
membuka Rekening Kas Nagari pada Bank yang ditunjuk			
dengan nama Rekening Kas Nagari yang bersangkutan;			
(2) Wali Nagari menyampaikan Rekening Kas Nagari kepada			
Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan			
Desa, dilampiri dengan:			
a. Asli rekening koran dari Rekening Kas Nagari;			
b. Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang			
penunjukan Bank tempat menampung Rekening Kas			
Nagari;			
•	<u> </u>		

c. Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan dan			
penetapan Bendahara Nagari;			
d. Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Nomor			
Rekening Kas Nagari; dan			
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).			
(5) Dalam hal terjadinya perubahan nomor dan nama			
rekening serta nama Bank, Wali Nagari harus			
menyampaikan perubahan tersebut secara tertulis			
kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan			
Masyarakat dan Desa.			
Pasal 34	Tetap	Tetap	Tetap
Pengambilan Dana Desa dan ADN yang telah masuk ke Rekening	Τεταρ	тстар	retap
Kas Nagari, dilakukan dengan cara mengisi slip/cek pengambilan			
uang yang ditandatangani oleh Bendahara dan PTPKN dan			
diketahui Wali Nagari.			
BAB IX	Tetap	Tetap	Tetap
	Тетар	Тетар	тетар
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN			
NAGARI Radion Kanatu			
Bagian Kesatu			
Umum			
Pasal 35			
(1) Wali Nagari dalam melaksanakan penatausahaan			
Keuangan Nagari menunjuk Bendahara Nagari;			
(2) Penunjukan Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud			
pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun			
anggaran bersangkutan berdasarkan keputusan Wali			
Nagari.			
(3) Penatausahaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud			
pada ayat (1) meliputi :			
a. Penatausahaan Penerimaan;			
b. Penatausahaan Pengeluaran, dan			
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.	_		_
Bagian Kedua	Tetap	Tetap	Tetap
Penatausahaan Penerimaan			
Pasal 36			
(1) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud			
dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a menggunakan:			
a. Buku kas umum;			
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;			
c. Buku kas harian pembantu;			
d. Buku kas pembantu pajak PPN/PPh dan retribusi			
daerah.			
(2) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan			
penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya			
melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada			
Wali Nagari pada tanggal 2 bulan berikutnya;			
(3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana			
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :			
a. Buku kas umum;			
b. Buku bantu bank			
c. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;			
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.			
·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Bagiar				
	n Ketiga	Tetap	Tetap	Tetap
	ausahaan Pengeluaran			
Pasal 3				
(1)	Penatausahaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud			
	dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b meliputi:			
	a. Buku kas umum;			
	b. Buku bantu bank			
	c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;			
	d. Buku kas harian pembantu			
	e. Buku kas pembantu pajak PPN/PPh			
(2)	Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan			
(-/	dengan Peraturan Nagari tentang APB Nagari atau			
	Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari;			
(3)	Pencairan Dana Nagari harus melalui Pengajuan Surat			
(3)	Permintaan Pembayaran (SPP);			
(4)				
(4)	Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)			
(5)	harus disetujui oleh Wali Nagari melalui PTPKN;			
(5)	Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan dalam			
	Buku Kas Umum Bendahara Nagari terhadap semua			
	penerimaan dan pengeluaran atas beban APB Nagari			
	termasuk Pajak Negara, dan Pajak Daerah dan bunga			
	Bank atas rekening Kas Nagari;			
(6)	Bendahara Nagari harus melakukan penatausahaan			
	keuangan Nagari sesuai dengan sistem akuntansi yang			
	berlaku;			
(7)	Bendahara Nagari wajib menyetorkan seluruh pajak			
	negara yang telah dipungutnya ke Kas Negara dan Pajak			
	Daerah ke Kas Daerah dalam bulan yang berjalan setelah			
	dilakukan pemungutan;			
(8)	Bendahara Nagari dilarang menyetorkan Pajak Negara			
` '	dan Pajak Daerah sekaligus pada akhir Tahun Anggaran;			
(9)	Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan			
(-)	penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya			
	melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran			
	kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 5 bulan			
	berikutnya;			
(10)	Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak			
(10)	berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang			
	berlaku.			
Ragias		Tetap	Tetap	Tetap
_	n Keempat	тетар	тетар	тетар
	nggungjawaban Penggunaan Keuangan Nagari			
Pasal 3				
(1)	Bendahara Nagari wajib memiliki Nomor Pokok Wajib			
(2)	Pajak (NPWP).			
(2)	Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan			
	penerimaan dan pengeluaran uang yang menjadi			
	tanggungjawabnya dengan membuat surat			
	pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran			
	Keuangan Nagari paling lambat tanggal 2 bulan			
	berikutnya;			
(3)	Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada			
	ayat (2) diketahui oleh PTPKN dan mendapat persetujuan			

oleh Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari; (4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan : a. Buku kas umum; b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku BAB X Tetap Tetap	
(4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan : a. Buku kas umum; b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
(4) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampiri dengan : a. Buku kas umum; b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
dilampiri dengan : a. Buku kas umum; b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
a. Buku kas umum; b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
b. Buku bantu bank; c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
c. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
sah; d. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara. (5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
(5) Pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Nagari disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
disampaikan setiap bulannya oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
Bupati dengan rekomendasi Camat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
evaluasi sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku	
berlaku	
I KAK X I LOTAN I LOTAN TATAN	
KEDUDUKAN KEUANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT	
NAGARI	
Pasal 39	
(1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan	
tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya	
berdasarkan ADN;	
(2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang	
diterima Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan	
Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;	
(3) Tambahan penghasilan diberikan kepada Wali Nagari,	
Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari, ditetapkan	
dengan Peraturan Nagari sesuai dengan ketentuan	
perundangan-undangan yang berlaku.	
Pasal 40 Tetap Tetap Tetap	
Terhadap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik dan	
melaksanakan serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya	
diatas tanggal 15 (lima belas) pada bulan bersangkutan, maka	
kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang bersangkutan	
dibayarkan pengahasilan tetap terhitung bulan berikutnya.	
BAB XI Tetap Tetap Tetap Tetap	
KEDUDUKAN KEUANGAN BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA	
NAGARI LAINNYA	
Bagian Kesatu	
Keuangan Bamus Nagari	
Pasal 41	
(1) Pimpinan dan anggota Bamus Nagari diberikan	
penghasilan setiap bulannya berdasarkan ADN yang telah	
di tetapkan.	
(2) Pengaturan lebih lanjut terhadap tunjangan Pimpinan	
dan Anggota Bamus Nagari ditetapkan sesuai dengan	
ketentuan yang berlaku.	
Pasal 42 Tetap Tetap Tetap	
(1) Untuk kegiatan Bamus Nagari disediakan biaya	
operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam	

		T	T	
	ADN.			
(2)	Pengelolaan biaya operasional Bamus Nagari dilakukan			
	oleh Sekretariat Bamus Nagari yang penunjukannya			
	ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari			
(3)	Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),			
(5)	ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari dengan			
	mempedomani ketentuan yang berlaku.			
Pasal		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Bamus Nagari wajib membuat Surat pertanggungjawaban			
	penggunaan keuangan Bamus Nagari yang bersumber			
	dari APB Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang			
	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari;			
(2)	Surat pertanggungjawaban penggunaan keuangan Bamus			
. ,	Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan			
	oleh Sekretaris Bamus Nagari dan diketahui oleh Ketua			
	Bamus Nagari.			
(2)	Surat pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis			
(3)				
	setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan			
	melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan			
	sah.			
Bagia	n Kedua	Tetap	Tetap	Pasal 44
Keuar	ngan Lembaga Nagari Lainnya			(1) Untuk kegiatan Lembaga Nagari lainnya
Pasal -	44			disediakan biaya operasional sesuai dengan
(1)	Untuk kegiatan Lembaga Nagari lainnya disediakan biaya			ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB
` ′	operasional sesuai dengan ketentuan yang telah			Nagari.
	ditetapkan dalam APB Nagari.			(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan			ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari
(2)	setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani			, ,
				dengan mempedomani ADN.
	ADN.			(3) Lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud
(3)	Lembaga Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada			pada ayat (1) terdiri dari:
	ayat (1) terdiri dari:			a. KAN
	a. KAN			b. LPMN
	b. LPMN			c. Tim Penggerak PKK Nagari.
	c. Tim Penggerak PKK Nagari.			 d. Tim Penggerak PKK Jorong.
	d. Tim Penggerak PKK Jorong.			e. Pokja profil Nagari
	e. Pokja profil Nagari			f. Ninik Mamak Penghulu Suku.
	f. Ninik Mamak Penghulu Suku.			g. Kelompok Dasawisma
	g. Kelompok Dasawisma			h. Kelompok Poskesri
1	h. Kelompok Poskesri			i. Kelompok Posyandu
				j. Kelompok PPKBN
	· ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	j. Kelompok PPKBN			k. Kelompok Sub PPKBN
1	k. Kelompok Sub PPKBN			I. Kelompok BKB
	I. Kelompok BKB			m. Kelompok BKR
	m. Kelompok BKR			n. Kelompok BKL
	n. Kelompok BKL			o. KPMN, dan/atau
1	o. KPMN			p. Lembaga Nagari Lainnya.
(3)	Besaran biaya operasional Lembaga Nagari Lainnya			(4) Besaran biaya operasional Lembaga Nagari
' '	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan			Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
	Keputusan Bupati.			ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Ragin	n Ketiga	Tetap	Tetap	Pasal 45
_	•	ιειαρ	Τειαρ	
	ngan Kader Pembinaan Agama Nagari			(1) Untuk kegiatan Pembinaan Agama Nagari
Pasal -	45		1	disediakan Dana Operasional bagi Kader

(1)	Untuk kegiatan Pembinaan Agama Nagari disediakan			pembinaan Agama Nagari dengan ketentuan
	Dana Operasional bagi Kader pembinaan Agama Nagari			yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
	dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APB			(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	Nagari.			ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari
(2)	Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan			dengan mempedomani ADN.
	setiap tahun dalam APB Nagari dengan mempedomani			(3) Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana
	ADN.			dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
(3)	Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud			a. Imam Nagari
	pada ayat (1) terdiri dari :			b. Gharim Nagari
	a. Imam Nagari			c. Khatib Nagari
	b. Gharim Nagari			d. Bilal Nagari
	c. Khatib Nagari			e. Guru TPQ/TPSQ Nagari
	d. Bilal Nagari			f. Guru Pondok Pesantren, dan/atau
	e. Guru TPQ/TPSQ Nagari			g. Kader Pembinaan Agama Nagari lainnya.
	f. Guru Pondok Pesantren			(4) Besaran biaya Kader Pembinaan Agama Nagari
(4)	Besaran biaya Kader Pembinaan Agama Nagari			sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
` '	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan			ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
	Keputusan Bupati.			6. sp
Pasal 4		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam	Tetap	, ctap	. ctup
(-)	Pasal 44 ayat (3) dan Kader Pembinaan Agama Nagari			
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) wajib			
	membuat surat pertanggungjawaban penggunaan			
	keuangan lembaga Nagari yang bersumber dari APB			
	Nagari kepada Wali Nagari selaku Pemegang Kekuasaan			
	Pengelolaan Keuangan Nagari;			
(2)	Surat Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Nagari			
(2)	dan Kader Pembinaan Agama Nagari sebagaimana			
	dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis			
	selambatnya tanggal 2 (dua) bulan berikutnya dengan			
	melampirkan bukti pendukung yang lengkap dan sah.			
(3)	Surat pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada			
(3)	ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Lembaga Nagari dan			
	diketahui oleh Lembaga Nagari.			
BAB X		Tetap	Tetap	Tetap
	II IJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN	Tetap	Tetap	Τεταρ
	IBAGAAN NAGARI			
Pasal 4				
(1)	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan			
(-)	Kelembagaan Nagari digunakan untuk pembayaran			
	honorarium, tunjangan, operasional, tambahan			
	penghasilan dan insentif Pemerintah Nagari,			
	Pemerintahan Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya.			
(2)	Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
(2)	dilaksanakan langsung oleh PTPKN.			
Pasal 4		Tetap	Tetap	Pasal 48 dihapus
	+o Honorarium Pemerintah Nagari terdiri dari :	Tetap	Тетар	rasai 40 uiiiapus
(1)				
	Honorarium Wali Nagari Honorarium Sekretaris Nagari			
	<u>-</u>			
	c. Honorarium Kepala Urusan d. Honorarium Kepala Jorong			
	e. Honorarium Juru Tata Usaha Kepala Jorong			
1	e. Honoranum juru rata Osana Kepala jorong			

	f. Honorarium Bendahara Nagari			
	g. Honorarium Pesuruh Kantor			
(2)	Honorarium Pemerintahan Nagari terdiri dari :			
(=)	a. Honorarium Ketua Bamus Nagari			
	b. Honorarium Wakil Ketua Bamus Nagari			
	_			
	c. Honorarium Sekretaris Bamus Nagari			
	d. Honorarium Anggota Bamus Nagari			
(3)	Honorarium Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana terdiri			
	dari :			
	a. KAN			
	 Honorarium Ketua KAN 			
	Honorarium Sekretaris KAN			
	b. LPMN			
	Honorarium Ketua LPMN			
	Honorarium Sekretaris LPMN			
Pasal		Tetap	Tetap	Pasal 49 dihapus
		Τειαρ	ισιαρ	r asai 43 uiliapus
(1)	Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48			
	dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik			
	dan/atau diangkat, dibuktikan dengan keputusan			
	pengangkatan dan/atau diangkat dari pejabat yang			
	berwenang.			
(2)	Untuk pembayaran Honorarium Pemerintah Nagari			
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditransfer			
	melalui bank, tempat rekening kas Nagari dibuka dan			
	ditransfer melalui masing-masing rekening Pemerintah			
	Nagari.			
(3)	Reward PBB dibayarkan berdasarkan Keputusan Bupati.			
Pasal		Tetap	Tetap	Pasal 50
(1)	Belanja Operasional Pemerintah Nagari adalah :		·	(1) Belanja Operasional Pemerintah Nagari adalah :
(1)	a. Belanja Barang dan Jasa			a. Belanja Barang dan Jasa
	b. Belanja Pemeliharaan			b. Belanja Pemeliharaan
	· ·			
	c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahaan Nagari			c. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
	d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari Luar			d. Belanja Perjalanan Dinas luar daerah
	Daerah			e. Belanja Lain-Lain
	e. Belanja Lain-Lain			f. Belanja Operasional Jorong
	f. Belanja Operasional Jorong			g. Belanja surat kabar/ majalah
	g. Belanja surat kabar/majalah			h. Belanja Makan dan Berbuka puasa,
	h. Belanja Makan dan Berbuka puasa			dan/atau
(2)	Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya terdiri dari			i. Operasional lainnya.
` '	a. Operasional KAN			(2) Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya
	b. Operasional LPMN			terdiri dari
	c. Operasional Tim Penggerak PKK Nagari			a. Operasional KAN
	d. Operasional Tim Penggerak PKK Jorong			b. Operasional LPMN
				· ·
	e. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku			c. Operasional Tim Penggerak PKK Nagari
	f. Operasional Kader Poskesri			d. Operasional Tim Penggerak PKK Jorong
	g. Operasional Kader Posyandu			e. Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku
	h. Operasional Kader PKK Nagari			f. Operasional Kader Poskesri
	 Operasional Kader PKK Jorong 			g. Operasional Kader Posyandu
	j. Operasional kelompok Dasa wisma			h. Operasional Kader PKK Nagari
	k. Operasional Kelompok kader PPKBN			i. Operasional Kader PKK Jorong
	I. Operasional Kelompok Kader Sub PPKBN			j. Operasional kelompok Dasa wisma
1	m. Operasional Kelompok Kader BKB			k. Operasional Kelompok kader PPKBN

n. Operasional BKR o. Operasional BKL (3) Insentif Kader Pembinaan Keagamaan Nagari terdiri dari: a. Insentif Imam Nagari b. Insentif Gharim Nagari c. Insentif Khatib Nagari d. Insentif Nagari e. Insentif Guru TPQ/TPQS Nagari f. Insentif Guru Ponpes			I. Operasional Kelompok Kader Sub PPKBN m. Operasional Kelompok Kader BKB n. Operasional BKR o. Operasional BKL, dan/atau p. Operasional Lembaga Nagari lainnya. (3) Operasional Kader Pembinaan Keagamaan Nagari terdiri dari: a. Operasional Imam b. Operasional Gharim c. Operasional Gharim d. Operasional Bilal e. Operasional Guru TPQ/TPSQ f. Operasional Guru Pondok Pesantrean, dan/atau g. Operasional Kader pembinaan Keagamaan Nagari lainnya.
Pasal 51 Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wali nagari selaku pengguna anggaran dan perangkat nagari selaku PTPKN dapat diberikan Honorarium Pengelola Keuangan Nagari.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 52 (1) Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, digunakan untuk : belanja bahan habis pakai kantor Pemerintah Nagari seperti untuk pembelian alat tulis kantor, foto copy, jilid, air, listrik, komunikasi, dan lainnya. (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan langsung oleh PTPKN.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 53 Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf b, digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung inventaris dan kendaraan dinas Pemerintahan Nagari.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 54 Belanja perjalanan dinas Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, dan huruf d, digunakan untuk biaya perjalanan dinas bagi Aparatur Pemerintahan Nagari sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas yang telah ditetapkan.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 55 Belanja lain-lain Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, digunakan untuk Musrenbang Nagari, Pembuatan Laporan Wali Nagari, biaya rapat dan biaya tamu pada Kantor Wali Nagari.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 56 Belanja Operasional Jorong sebagaimana dimaksud alam Pasal 50 ayat (1) huruf f, digunakan untuk biaya alat tulis, foto copy dan biaya rapat pada kantor jorong.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 57 Belanja Operasional Lembaga Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), dipergunakan untuk:	Tetap	Tetap	Tetap

a.	Biaya Perjalanan Dinas;			
b.	Biaya Rapat, dan			
c.	Biaya Alat Tulis Kantor.			
Pasal .	58	Tetap	Tetap	Tetap
Besari	nya biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan alat tulis kantor	·	·	·
pada	lembaga Pemerintahan Nagari dan lembaga Lainnya			
	aimana dimaksud dalam Pasal 57, disesuaikan dan tidak			
	ihi indeks pengeluaran yang sama pada Pemerintahan			
Nagar	, , , , ,			
Pasal		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Pemberian Operasional kepada Lembaga Nagari Lainnya	· ctap	retap	Tetap
(1)	dan kader pembinaan keagamaan Nagari sebagaimana			
	dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) harus			
	memiliki output yang jelas dan terukur dituangkan dalam			
	bentuk laporan bulanan yang disampaikan kepada Wali			
	Nagari.			
(2)	Pembayaran Operasional sebagaimana dimaksud pada			
(2)	ayat (1) dibayarkan per triwulan setiap tahunnya.			
DARY		T-4	T-4	Taka a
BAB X		Tetap	Tetap	Tetap
	IJA MODAL NAGARI			
_	Kesatu			
_	aan Belanja Modal Nagari			
Pasal				
(1)	Belanja Modal Nagari digunakan untuk kegiatan			
	pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan			
	prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari serta			
	pengadaan barang yang akan menjadi aset Nagari.			
(2)	Belanja Modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat			
	(1) terdiri dari:			
	 Belanja Modal Nagari bersifat fisik 			
	 Belanja Modal Nagari Pengadaan Barang. 			
(3)	Belanja Modal Nagari tidak dibenarkan digunakan untuk:			
	a. Pembuatan Tugu			
	b. Usaha simpan pinjam			
	c. Kegiatan-kegiatan seremonial lainnya seperti			
	perayaan Hari Ulang tahun, Keagamaan,			
	Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian.			
(4)	Belanja modal Nagari untuk kegiatan Safari Ramadhan			
	dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-			
	(sepuluh juta rupiah).			
(5)	Pengalokasian Belanja Modal Nagari ditetapkan dalam			
	APB Nagari.			
Pasal		Tetap	Tetap	Tetap
(1)	Kegiatan pembangunan, peningkatan, Pemeliharaan	·	·	·
` ′	sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi			
	Nagari serta pengadaan barang sebagaimana dimaksud			
	dalam Pasal 60 yang akan dilaksanakan tercantum pada			
	rincian RKP dan APB Nagari.			
(2)	Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada			
(-/	ayat (1) merupakan perwujudan aspirasi Masyarakat yang			
	diawali dengan musyawarah pada tingkat Nagari oleh			
	Pemerintah Nagari dengan Lembaga-lembaga yang ada di			
	remembaga yang ada di			

Nagari yang kegiatannya belum ditampung dalam			
kegiatan Daerah dan/atau Provinsi, yang ditetapkan oleh			
Wali Nagari dan Bamus Nagari.			
(3) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)			
membutuhkan teknis konstruksi maka pelaksanaannya			
harus melibatkan tenaga teknis dari konsultan (Tim			
Teknis) yang ditetapkan oleh Wali Nagari;			
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus			
mempunyai tanda wajib pajak berupa NPWP;			
(5) Kegiatan yang dilaksanakan dapat memotivasi serta			
menimbulkan semangat dan partisipasi masyarakat			
dalam membangun Nagari.			
Pasal 62	Tetap	Tetap	Tetap
Pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan	ТСТАР	τεταρ	Tetap
sarana dan prasarana Nagari yang berdaya guna bagi Nagari			
serta pengadaan barang dilaksanakan oleh TPK dengan mengacu			
kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di			
Nagari.	Tetap	Totan	Tetap
Bagian Kedua	тецар	Tetap	тетар
Besaran Belanja Modal Nagari			
Pasal 63			
(1) Besaran belanja modal yang bersumber dari ADN			
dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah			
penduduk miskin, luas wilayah dan indek kesulitan			
geografis.			
(2) Pengalokasian belanja modal sebagaimana dimaksud			
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.			
Bagian Ketiga	Tetap	Tetap	Tetap
Pencairan Anggaran Belanja Modal Nagari			
Pasal 64			
(1) Permohonan Pencairan Dana belanja modal Nagari			
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan			
melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :			
a. RKP Nagari;			
b. APB Nagari;			
c. Proposal kegiatan yang berisikan Rencana Anggaran			
Biaya (RAB) Pekerjaan yang telah disahkan oleh Tim			
Teknis;			
d. Schedule Pelaksanaan Pekerjaan;			
e. Foto awal atau foto kondisi 0%;			
f. Surat Keputusan Wali Nagari tentang Susunan TPK			
Kegiatan; dan			
g. Surat Perjanjian Kerja antara TPK dengan Wali			
Nagari;			
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
terlebih dahulu dilakukan Verifikasi sebelum			
direkomendasikan oleh Camat.			
		T-1	T-1
Bagian Keempat	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Pertanggungjawaban Belanja Modal Nagari	Tetap	тетар	тетар
	Tetap	тетар	тетар
Pertanggungjawaban Belanja Modal Nagari	Tetap	тетар	retap

	kualitas maupun kuantitas pekerjaan sesuai dengan RAB			
	dan/atau spesifikasi barang yang diajukan, serta			
	bertanggungjawab membuat pelaporan pekerjaan dan			
	penggunaan dana;			
(2)	Mekanisme pertanggungjawaban TPK sebagai berikut :			
(2)	a. Ketua TPK bertanggungjawab penuh atas			
	pelaksanaan fisik dan Keuangan belanja modal			
	Nagari ;			
	b. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus dilaporkan			
	paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan			
	diterima;			
	c. Pelaksanaan kegiatan dilapangan harus diselesaikan			
	sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati			
	antara TPK dan Wali Nagari.			
	d. TPK harus menyerahkan laporan dan			
	pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai			
	kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;			
	e. Tenaga Teknis dan Tim Pemantau membuat berita			
	Acara hasil pemeriksaan fisik dilapangan dan			
	laporan keuangan pelaksanaan kegiatan dalam			
	setiap tahapan (realisasi kegiatan 80 % dan 100%)			
	kepada Wali Nagari dan Camat;			
(3)	Wali Nagari melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan			
, ,	belanja modal Nagari yang diperuntukan untuk			
	pembangunan Nagari kepada Bupati melalui Camat pada			
	akhir tahun anggaran, dan selambatlambatnya tanggal 5			
	Januari tahun anggaran berikutnya;			
BAB X		Tetap	Tetap	Tetap
PERTA	ANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN			
	n Kesatu			
_	nggungjawaban			
Pasal				
(1)	Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya terhadap			
(1)	seluruh Penggunaan Dana untuk melaksanakan kegiatan			
	sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.			
(2)	Pertanggungjawaban Dana Desa dan ADN terintegrasi			
(2)	dengan pertanggungjawaban APB Nagari yang harus			
	disampaikan kepada Bupati Melalui Camat setelah			
	persetujuan dari Bamus Nagari.			
(3)	Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat			
(3)	(2) adalah dalam rangka pertanggungjawaban APB			
	Nagari.			
Pasal		Pasal 67	Tetap	Tetap
(1)	Pemerintah Nagari Membuat Surat Pertanggungjawaban	(1) Pemerintah Nagari Membuat Surat Pertanggungjawaban	ιειαμ	ιειαρ
(1)	(SPJ) sesuai tahapan pencairan.	(SPJ) sesuai tahapan pencairan.		
(2)	Pemerintah Nagari membuat surat pertanggungjawaban	(2) Pemerintah Nagari membuat surat pertanggungjawaban		
(2)	(SPJ) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :	(SPJ) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Lembaran I dipegang Bendaharawan Nagari (Asli)	a. Lembaran I dipegang Bendaharawan Nagari (Asli);		
		b. Lembaran II disampaikan kepada Camat;		
	·			
	c. Lembaran III disampaikan Dinas Pemberdayaan	c. Lembaran III disampaikan kepada Dinas		
	Masyarakat dan Desa d. Lembaran IV untuk Inspektorat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. Lembaran IV disampaikan kepada Inspektorat;		
	u. Lennardii IV UIIIUK IIISDEKIDIdi	ı u. Leilibalalı iy ulsallıbalkalı kebaya ilisbektolat; l		

(3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud e. Lembaran V disampaikan kepada Badan Keuangan pada ayat (1) diverifikasi/diperiksa oleh Camat. Daerah.	
1 (2) Surat Portanggungiawahan (SDI) cahagaimana dimaksud	
(3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi/diperiksa oleh Camat.	
Pasal 68 Tetap Tetap	Tetap
(1) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi belanja operasional	retap
lembaga Pemerintahan Nagari dan belanja lembaga	
Nagari lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70	
adalah berupa kwitansi dengan dilampiri faktur	
penggunaan Dana yang dimaksud.	
(2) Segala ketentuan atau kelengkapan surat	
pertanggungjawaban tetap berlaku pada kegiatan	
pembangunan yang dilaksanakan oleh pengelola	
kegiatan.	
(3) Segala peraturan perundang-undangan tentang	
perpajakan tetap berlaku dalam penggunaan Dana Desa	
dan ADN.	
(4) Format SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai	
dengan ketentuan yang berlaku.	
Bagian Kedua Tetap Tetap	Tetap
Pelaporan	
Pasal 69	
(1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi fisik dan	
Keuangan penggunaan Dana Desa dan ADN kepada	
Bamus Nagari dan Camat setiap 3 (tiga) bulan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan	
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi camat untuk membuat laporan per triwulan	
kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
dan Desa, Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah.	
BAB XVI Tetap Tetap	Tetap
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 70	
(1) Pemerintah Daerah harus melaksanakan fungsi	
pembinaan, monitoring, pengawasan dan dan evaluasi	
terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN sejak proses	
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan	
pemanfaatannnya	
(2) Pengawasan, monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana	
Desa dan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilakukan oleh Tim evaluasi terdiri dari :	
a. Inspektorat b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
c. Badan Keuangan Daerah	
d. BAPPPEDA	
e. Bagian Pembangunan	
f. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
g. Bagian Hukum	
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
Pasal 71 Tetap Tetap	Tetap
Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN terdiri	
dari:	

a. Pengawasan Fungsional;		T	
b. Pengawasan Melekat;			
c. Pengawasan Masyarakat; dan			
d. Pengawasan Umum.			
Pasal 72	Tetap	Tetap	Tetap
	тецар	тетар	Tetap
Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71			
huruf a, dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat			
Daerah, BPKP dan Instansi pemeriksa lain sesuai dengan tugas			
pokok dan fungsinya.			
Pasal 73	Tetap	Tetap	Tetap
Pengawasan melekat terhadap penggunaan Dana Desa dan ADN			
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh			
Camat.			
Pasal 74	Tetap	Tetap	Tetap
Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71			
huruf c dilakukan oleh Masyarakat dan Lembaga swadaya			
Masyarakat (LSM).			
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa			
kritikan, saran atau masukan terhadap kegiatan pembangunan			
Nagari yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Camat.			
Pasal 75	Tetap	Tetap	Tetap
Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf	retup	Τεταβ	Tetap
d dilakukan oleh Bamus Nagari.			
BAB XVII	Totan	Totan	Tetap
KETENTUAN PERALIHAN	Tetap	Tetap	Тетар
Pasal 76			
(1) Pagu dan rincian penggunaan Dana Desa dan ADN			
ditetapkan melalui keputusan Bupati setiap tahunnya.			
(2) Jika terjadi pemekaran Nagari atau Jorong sebelum tahun			
anggaran baru, maka ADN tetap menggunakan ADN pada			
Nagari Induk.			
BAB XVIII	Tetap	Tetap	Tetap
KETENTUAN LAIN-LAIN			
Pasal 77			
Pedoman penyusunan dan pengelolaan keuangan Nagari			
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.			
BAB XIX	Tetap	Tetap	Tetap
KETENTUAN PENUTUP		·	
Pasal 78			
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati			
Dharmasraya Nomor 8 tahun 2016 tentang Pedoman			
Umum Pengelolaan Keuangan Nagari Kabupaten Dharmasraya			
(Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 8			
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.			
Pasal 79	Tetap	Tetap	Tetap
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	ιειαμ	Τειαρ	Τεταρ
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan			
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya			
dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.			

Ditetapkan di Pulau Punjung	Ditetapkan di Pulau Punjung	Ditetapkan di Pulau Punjung	Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017	Pada tanggal 28 April 2017	Pada tanggal 24 Oktober 2017	Pada tanggal 16 Januari 2018
BUPATI DHARMASRAYA,	BUPATI DHARMASRAYA,	BUPATI DHARMASRAYA,	BUPATI DHARMASRAYA,
ttd	ttd	ttd	ttd
SUTAN RISKA	SUTAN RISKA	SUTAN RISKA	SUTAN RISKA
Diundangkan di Pulau Punjung	Diundangkan di Pulau Punjung	Ditetapkankan di Pulau Punjung	Diundangkankan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017	Pada tanggal 28 April 2017	Pada tanggal 24 Oktober 2017	Pada tanggal 16 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH,	Plt. SEKRETARIS DAERAH,	Plt. SEKRETARIS DAERAH,	Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd	ttd	ttd	ttd
LELI ARNI	LELI ARNI	LELI ARNI	LELI ARNI
BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017	BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017	BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017	BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
NOMOR 4	NOMOR 22	NOMOR 49	2018 NOMOR 5